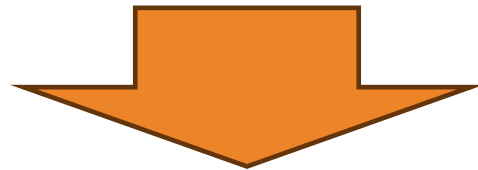




- Pemkot Yogyakarta telah menetapkan **KEPWAL Yogyakarta nomor 169 tahun 2022** tentang peta jalan pengendalian inflasi daerah tahun 2022-2024. Keputusan itu memuat strategi kunci **4 K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.**



**Berjalannya Waktu & Kondisi GLOBAL  
maka Perlu Penyesuaian dan  
Pembaharuan Peta Jalan untuk periode  
2025-2027**

# PENDAHULUAN

- Arah kebijakan transformasi RPJPD Kota Yogyakarta tahun 2025-2045 periode I (2025-2029) pada Misi Transformasi Ekonomi salah satunya adalah Kebijakan Peningkatan pengendalian dan penanggulangan dampak inflasi daerah. Kebijakan tersebut bagian dari misi Mewujudkan Kota Yogyakarta Maju melalui Transformasi Ekonomi yang Merata dan Berkeadilan.
- Indikator Utama Pembangunan dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 yang terkait kebijakan pengendalian dan penanggulangan dampak inflasi daerah adalah Indeks Perkembangan Harga/Inflasi. Nilai indeks ini ditargetkan pada tahun 2029 sebesar 2,41%-3,80%.
- Selama ini, komponen bergejolak (volatile food) berkontribusi pada inflasi Kota Yogyakarta namun sumber banyak ditentukan oleh factor yang di luar kontrol Pemkot Yogyakarta, seperti administered price (harga energi, suku bunga), tarif transportasi, factor alam, waktu panen, harga internasional, dll. Implikasinya, peran pemkot lebih pada pemantauan, koordinasi, penanganan dampak sesaat, dan persuasi publik

# TUJUAN KAJIAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA YOGYAKARTA

1. Menganalisis dan Mengevaluasi Program & Kegiatan pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi di Kota Yogyakarta yang telah berjalan.
2. Menganalisis efektifitas Program & Kegiatan yang telah berjalan dalam pengendalian Inflasi
3. Mengidentifikasi Program & Kegiatan yang efektif dan tepat sasaran dalam pengendalian Inflasi di Kota Yogyakarta
4. Menyusun Strategi & Kebijakan dalam pengendalian Inflasi di Kota Yogyakarta.
5. Memunculkan inovasi baru & pengembangan inovasi yang sudah berjalan dalam pengendalian Inflasi di Kota Yogyakarta.
6. Tersusunnya program & kegiatan ke dalam peta jalan pengendalian Inflasi di Kota Yogyakarta baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang.

# DASAR HUKUM PENYUSUNAN KAJIAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**  
**Pasal 10 dan Pasal 11** UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan konkuren, yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah.
- 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)**  
**Perpres No. 23 Tahun 2017** menjadi salah satu dasar hukum utama bagi daerah untuk membentuk **Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)**. TPID bertugas melakukan koordinasi dalam rangka merumuskan kebijakan dan program pengendalian inflasi daerah.
- 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan**  
UU No. 9 Tahun 2016 menekankan pentingnya stabilitas sistem keuangan, di mana pengendalian inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional dan daerah.

# **DASAR HUKUM PENYUSUNAN KAJIAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH**

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengendalian Inflasi Daerah**
- 5. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia**  
Salah satu dasar hukum pengendalian inflasi di daerah berasal dari Bank Indonesia melalui koordinasi antara TPID dan Bank Indonesia dalam hal penyediaan data, analisis inflasi, dan penyusunan kebijakan makroekonomi yang berdampak pada daerah.
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**  
Perencanaan pembangunan nasional, termasuk pembangunan ekonomi di daerah, harus meliputi langkah-langkah pengendalian inflasi.
- 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.**
- 8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pengendalian Inflasi.**
- 9. Instruksi Presiden (Inpres) terkait Pengendalian Inflasi**

## OUTLINE LAPORAN AKHIR

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latarbelakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Sasaran
- 1.4. Ruang Lingkup
- 1.5. Landasan Hukum

### BAB II LANDASAN KONSEPUAL

- 2.1. Teori Inflasi
- 2.2. Konsep Pengendalian Inflasi

### BAB III METODE PENELITIAN

- 3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
- 3.2. Jenis Data dan Sumber Data
- 3.3. Metode Analisis

### BAB IV GAMBARAN UMUM

- 4.1. Deskripsi Geografis (diuraian hanya yang relevan dgn inflasi (supply & demand)
- 4.2. Perkembangan Makro Ekonomi
- 4.3. Perkembangan Inflasi Kota Yogyakarta (data minimal 3 tahun terakhir:

### BAB V ANALISIS DATA

- 5.1. Analisis Perkembangan Inflasi Kota Yogyakarta
  - analisis data perkembangan dan tren minimal 3 tahun terakhir (kalau bisa 5 tahun);
  - analisis sektor dan komoditas pendorong inflasi
  - analisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi (keterkaitan dengan variable makro lain)
- 5.2. Analisis Evaluasi Program dan Kegiatan Pengendalian Inflasi
  - Deskripsi kebijakan pengendalian inflasi
  - Deskripsi bentuk program dan kegiatan pengendalian inflasi yang selama ini dilakukan
  - Evaluasi efektivitas atas pelaksanaan program dan kegiatan
- 5.3. Analisis Kebutuhan Kebijakan
  - Identifikasi usulan program dan kegiatan
  - Identifikasi inovasi program dan kegiatan
- 5.4. Perumusan Strategi dan Kebijakan
  - Perumusan strategi dan kebijakan pengendalian inflasi

### BAB VI PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI

- Matriks rencana aksi dgn indicator, dan tata waktu 2025-2027

## DRAF LAPORAN AKHIR

# PENYUSUNAN ROAD MAP PENGENDALIAN INFLASI KOTA YOGYAKARTA 2025-2027

Bagian Perekonomian dan  
Kerjasama Sekretariat Daerah  
Kota Yogyakarta



# PENGERTIAN INFLASI

## 1. Milton Friedman

"Inflasi adalah fenomena moneter", artinya inflasi terjadi karena adanya peningkatan jumlah uang beredar lebih cepat daripada pertumbuhan produksi barang dan jasa.

## 2. John Maynard Keynes

Menurut Keynes, inflasi terjadi ketika permintaan agregat (total permintaan dalam perekonomian) melebihi penawaran agregat (total produksi barang dan jasa), yang mengakibatkan kenaikan harga.

## 3. Samuelson dan Nordhaus

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan terus-menerus dalam harga barang dan jasa, dan mereka juga menekankan bahwa inflasi sering kali disebabkan oleh ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan serta adanya peningkatan biaya produksi



# INFLASI

## PENGERTIAN INFLASI

- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **inflasi adalah kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang.**

- Buruh Demo → nuntut hak →  
kesejahteraan → **kenaikan Gaji ( $Y_{naik}$ )**



- Majikan? → Gaji → **Bagian dari Cost ( $C_{naik}$ )**



**Harga Naik**



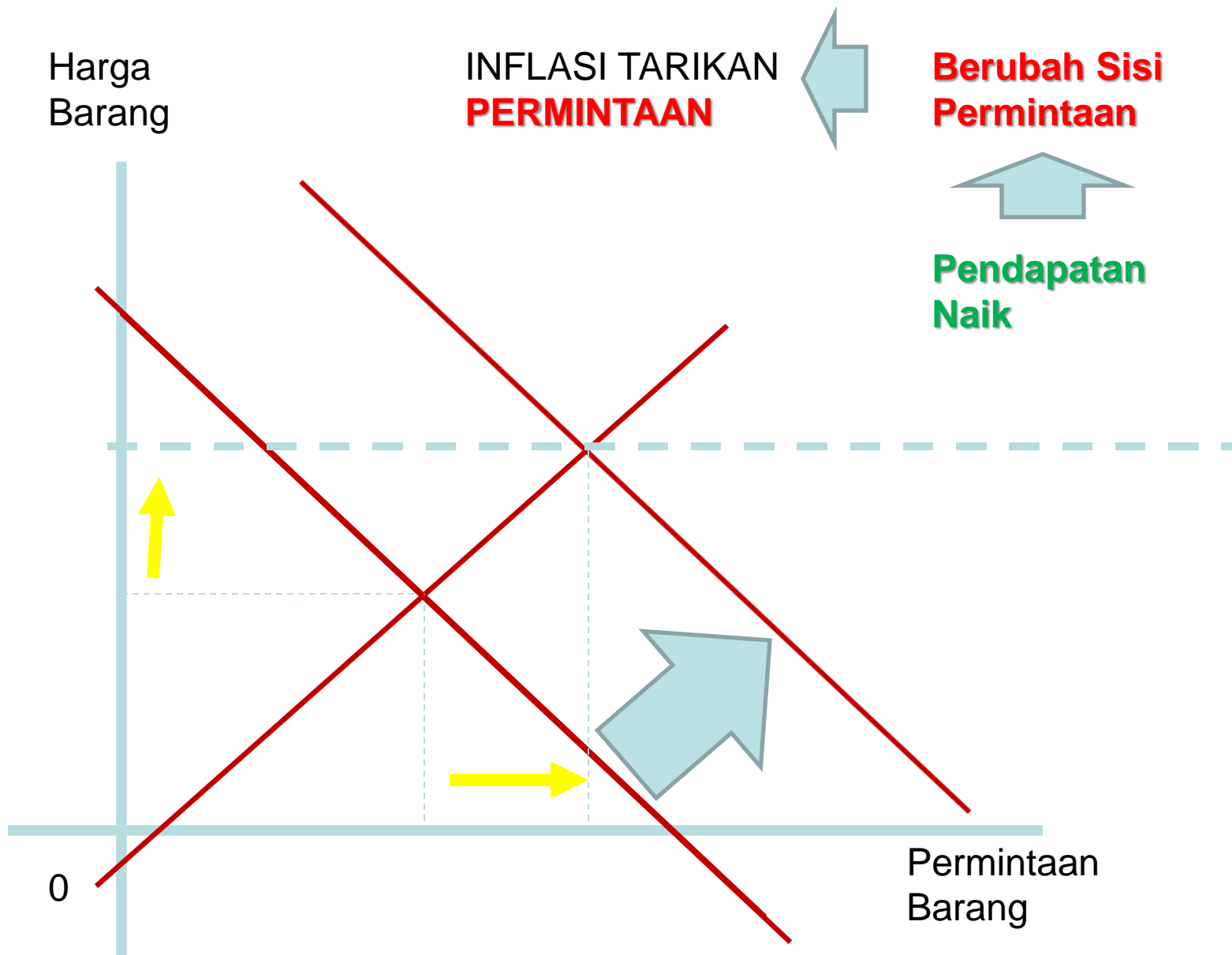
**KESEJAHTERAAN  
TURUN**

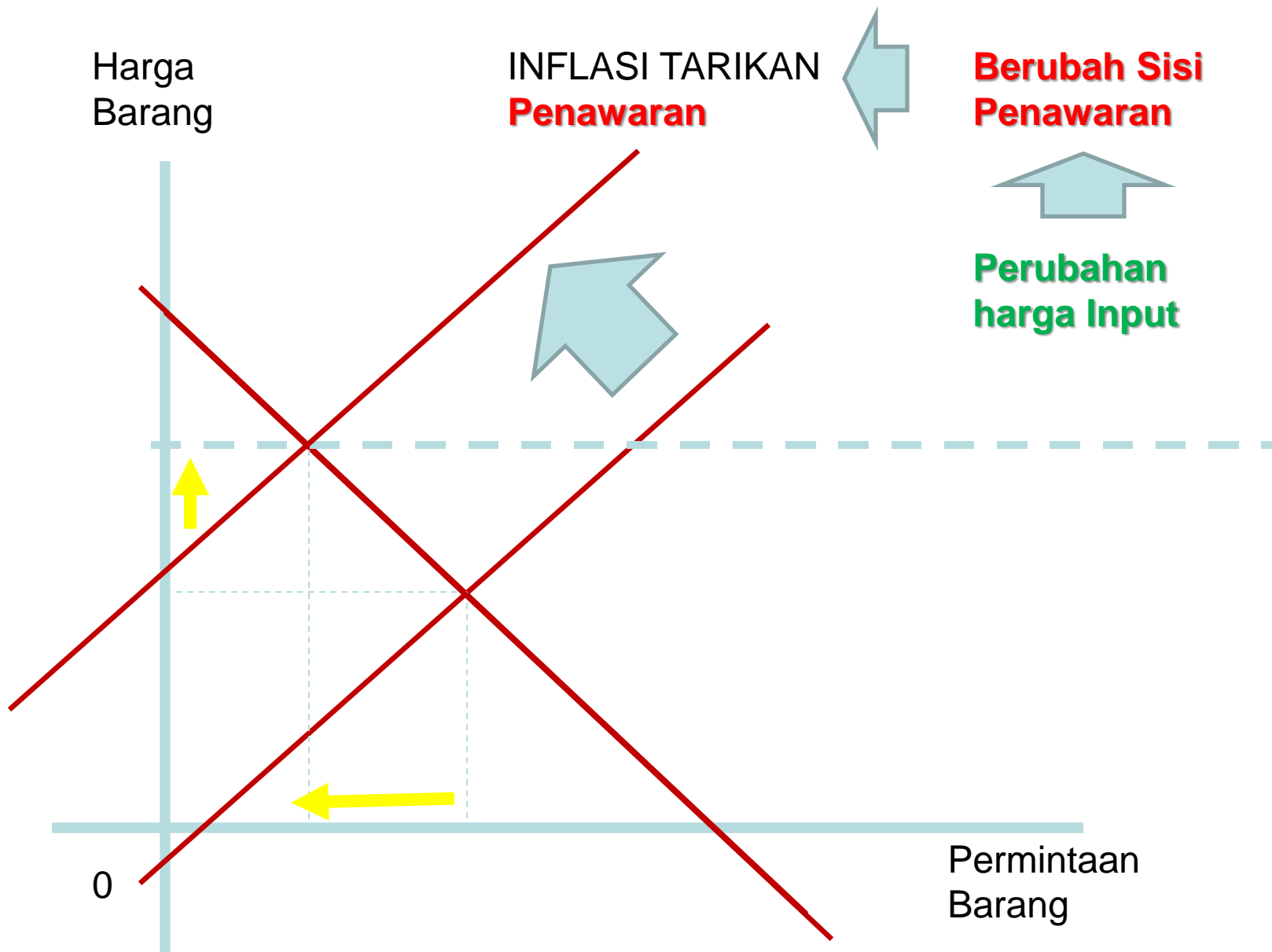


**Inflasi**



**Daya Beli Turun** ← **( $Y_{naik}/P_{naik}$ ) turun**





# AKIBAT BURUK INFLASI

Inflasi tinggi tidak akan menggalakan perkembangan ekonomi

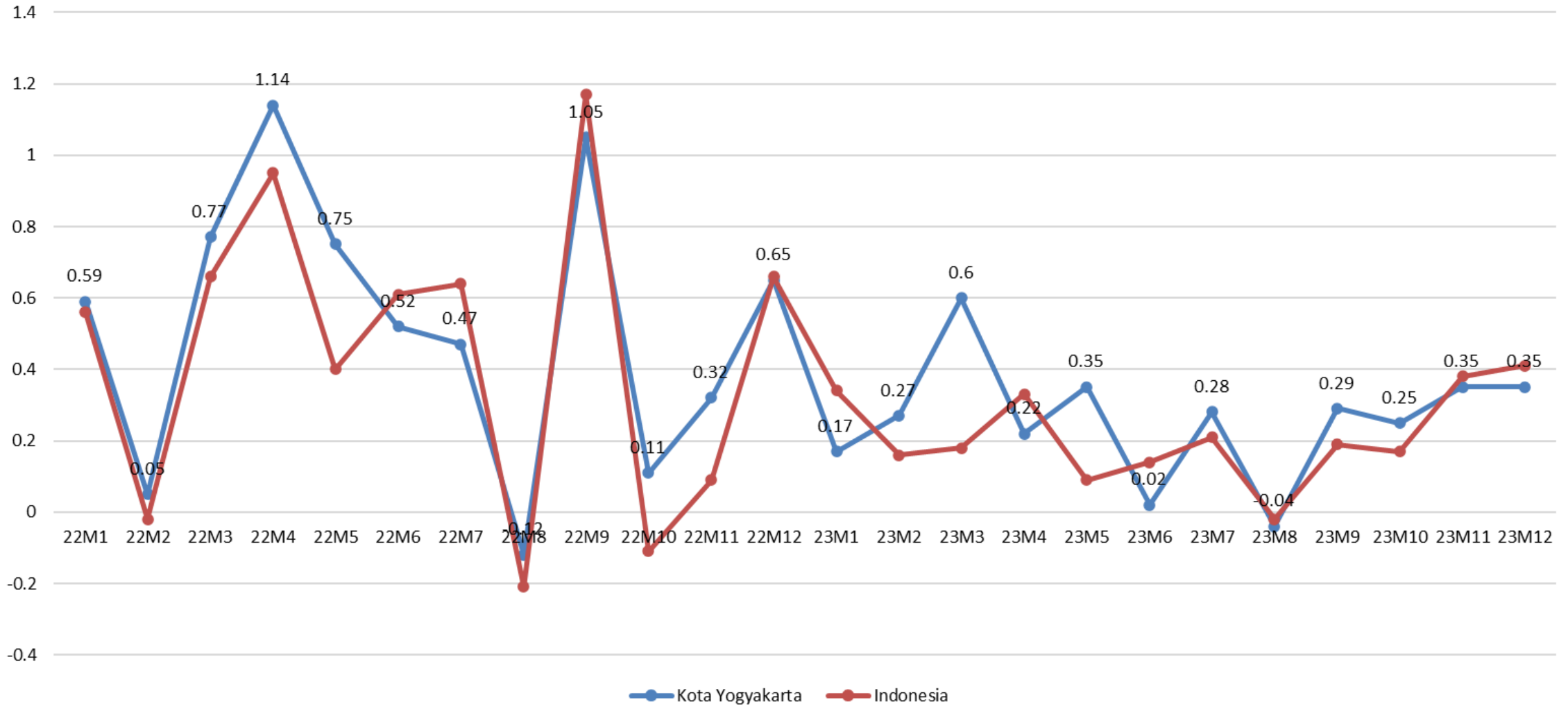
Kenaikan harga-harga menimbulkan efek buruk ke atas perdagangan (daya saing menurun)

Inflasi akan menurunkan pendapatan riil

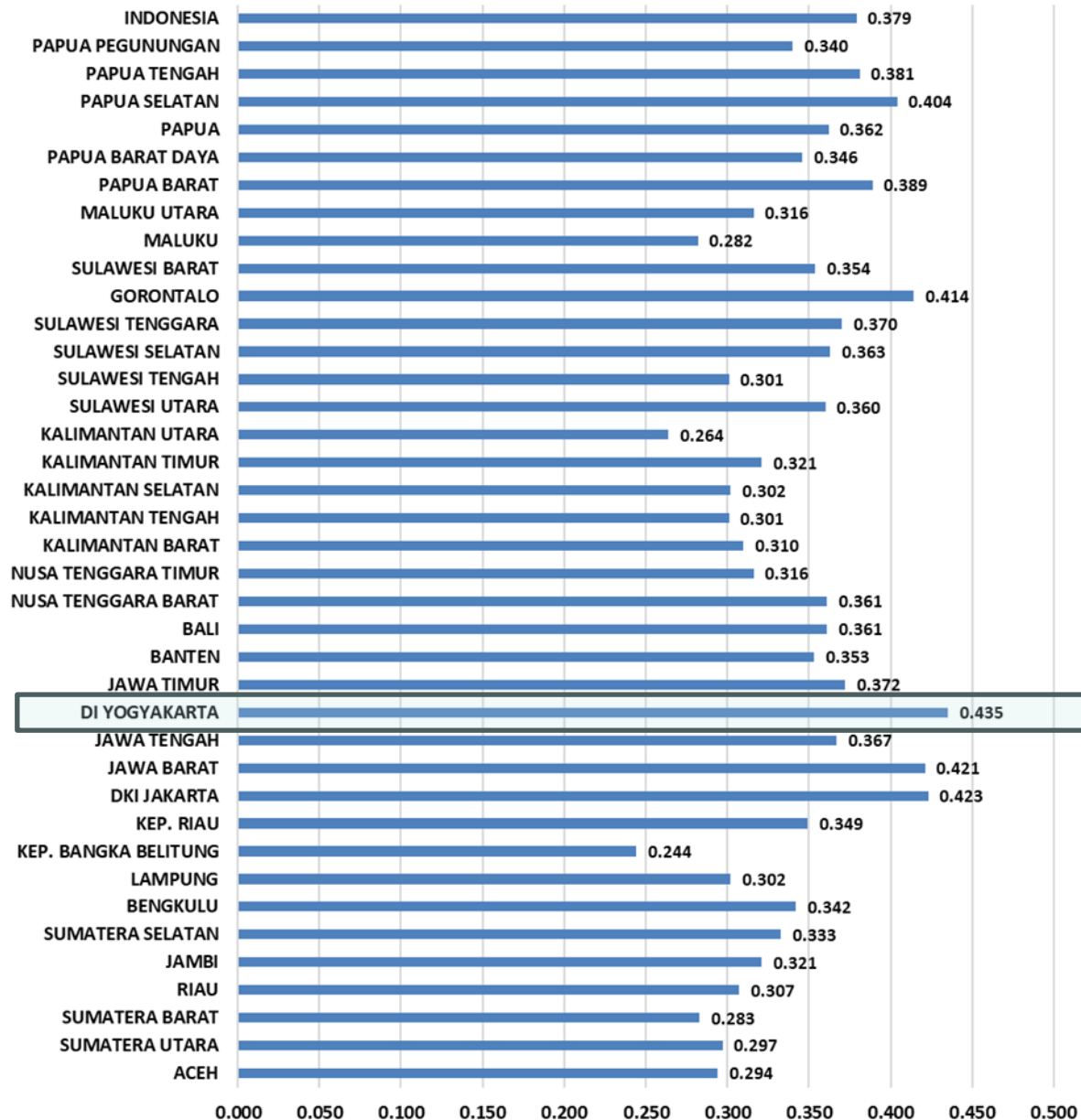
Inflasi akan menurunkan nilai kekayaan yang berbentuk uang

Memperburuk pembagian kekayaan

INFLASI KOTA YOGYAKARTA 2022M1-2023M12



## GINI RATIO INDONESIA TAHUN 2024



Indeks Gini atau koefisien Gini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pembagian pendapatan, kekayaan, atau konsumsi dalam suatu wilayah atau negara.

# FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFLASI

Tahun	Inflasi_Jogja	Kurs	EG_Nas	TB_Deposito	UMK	KonsRT_jogja
2000	7.32	8,422	3.34	12	352,918	4,953,701
2001	12.56	10,261	3.64	16	384,220	6,343,212
2002	12.01	9,311	4.50	13	418,298	6,732,724
2003	5.73	8,577	4.78	7	455,399	7,122,236
2004	6.95	8,939	5.03	6	495,790	7,511,748
2005	14.98	9,705	5.69	12	539,764	7,901,260
2006	10.4	9,159	5.50	9	587,637	8,290,772
2007	7.99	9,141	6.35	7	639,757	8,680,284
2008	9.88	9,699	6.01	11	696,500	9,069,796
2009	3.6	10,390	4.63	7	758,275	9,459,308
2010	7.38	9,090	6.22	6	825,530	9,848,819
2011	3.88	8,770	6.17	6	898,749	10,238,331
2012	4.31	9,387	6.03	8	978,463	10,216,079
2013	7.32	10,461	5.56	9	1,065,247	10,720,198
2014	6.59	11,865	5.02	8	1,173,300	11,264,629
2015	3.09	13,389	4.79	6	1,302,500	11,812,617
2016	2.29	12,935	-9.05	6	1,452,400	12,416,387
2017	4.2	13,343	2.64	7	1,572,200	13,072,918
2018	2.66	13,751	2.57	7	1,709,150	13,593,922
2019	2.77	14,158	2.51	6	1,848,400	14,091,276
2020	1.4	14,566	-2.07	4	2,004,000	13,500,058
2021	2.29	14	3.69	3	2,069,530	13,706,004
2022	6.49	16	5.31	4	2,153,970	14,069,715
2023	3.17	15	5.05	4	2,324,776	14,778,102

Sumber: BPS (Diolah)

# MODEL REGRESI LINEAR BERGANDA

Dependent Variable: **INFLASI\_JOGJA**

Method: Least Squares

Date: 12/16/24 Time: 00:20

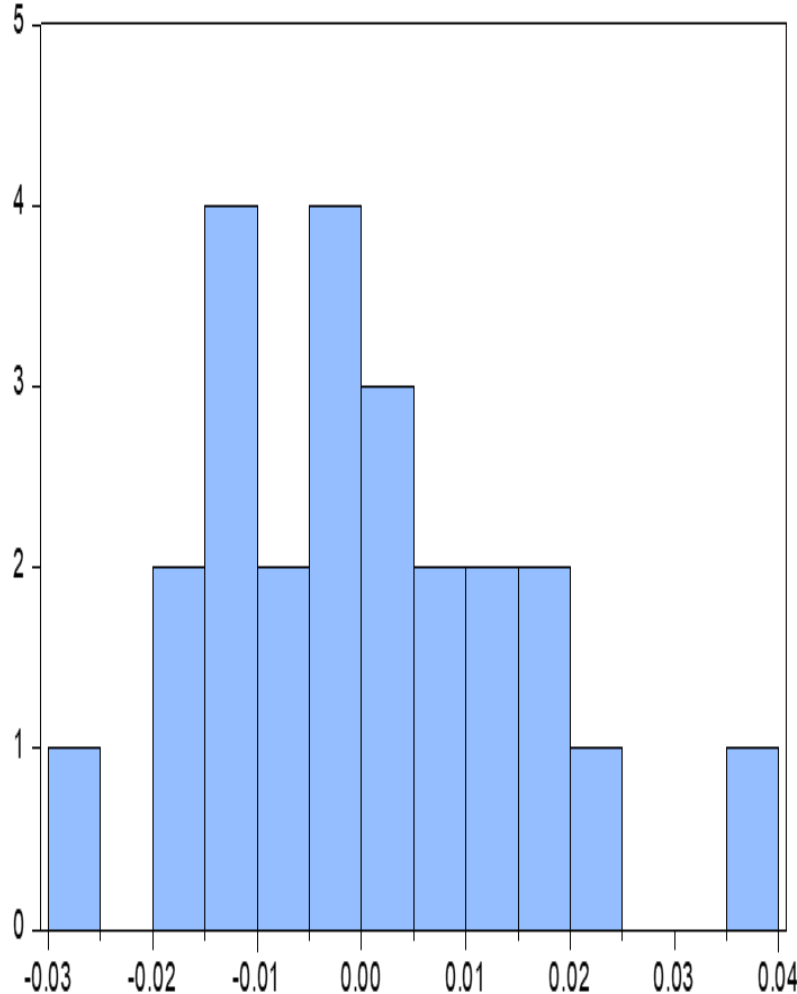
Sample: 2000 2023

Included observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
LOG(KURS)	<b>-0.006517</b>	0.002313	-2.817385	0.01
EG_NAS	0.069680	0.131992	0.527910	0.60
TB_DEPOSITO	<b>0.877911</b>	0.183779	4.776989	0.00
LOG(UMK)	-0.106453	0.037648	-2.827573	0.01
LOG(KONSRT_JOGJA)	<b>0.179459</b>	0.071858	2.497421	0.02
C	-1.380461	0.668278	-2.065699	0.05

R-squared	0.829004	Mean dependent var	0.0621
Adjusted R-squared	<b>0.781505</b>	S.D. dependent var	0.0365
S.E. of regression	0.017080	Akaike info criterion	-5.0895
Sum squared resid	0.005251	Schwarz criterion	-4.7950
Log likelihood	67.07457	Hannan-Quinn criter.	-5.0114
F-statistic	17.45313	Durbin-Watson stat	2.0911
Prob(F-statistic)	0.000002		

# ASUMSI KLASIK (UJI NORMALITAS & MULTIKOLINEARITAS)



Series: Residuals  
Sample 2000 2023  
Observations 24

Mean	7.22e-16
Median	-0.000991
Maximum	0.035753
Minimum	-0.027763
Std. Dev.	0.015109
Skewness	0.395514
Kurtosis	2.777316
Jarque-Bera	0.675312
Probability	0.713441

Variance Inflation Factors  
Date: 12/16/24 Time: 00:26  
Sample: 2000 2023  
Included observations: 24

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
LOG(KURS)	5.35E-06	33.47811	2.077034
EG_NAS	0.017422	3.696352	1.500857
TB_DEPOSITO	0.033775	18.80073	2.575989
LOG(UMK)	0.001417	22108.71	40.45558
LOG(KONSRT_JOGJA)	0.005164	110383.8	35.65899
C	0.446595	36742.67	NA

# UJI AUTOKORELASI & UJI HETEROSKEDASTISITAS

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.041565	Prob. F(2,16)	0.9594
Obs*R-squared	0.124051	Prob. Chi-Square(2)	0.9399

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 12/16/24 Time: 00:25

Sample: 2000 2023

Included observations: 24

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(KURS)	-0.000182	0.002571	-0.070840	0.9444
EG_NAS	0.003075	0.141245	0.021768	0.9829
TB_DEPOSITO	-0.002340	0.195186	-0.011991	0.9906
LOG(UMK)	-0.001155	0.040569	-0.028470	0.9776
LOG(KONSRT_JOGJA)	0.001894	0.077221	0.024531	0.9807
C	-0.013001	0.715066	-0.018181	0.9857
RESID(-1)	-0.077746	0.270492	-0.287423	0.7775
RESID(-2)	-0.009135	0.276797	-0.033002	0.9741

R-squared	0.005169	Mean dependent var	7.22E-16
Adjusted R-squared	-0.430070	S.D. dependent var	0.015109
S.E. of regression	0.018069	Akaike info criterion	-4.928063
Sum squared resid	0.005224	Schwarz criterion	-4.535379
Log likelihood	67.13676	Hannan-Quinn criter.	-4.823884
F-statistic	0.011876	Durbin-Watson stat	1.972209
Prob(F-statistic)	0.999998		

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.432248	Prob. F(5,18)	0.8202
Obs*R-squared	2.572747	Prob. Chi-Square(5)	0.7655
Scaled explained SS	1.286039	Prob. Chi-Square(5)	0.9364

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 12/16/24 Time: 00:26

Sample: 2000 2023

Included observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.011449	0.012452	-0.919445	0.3700
LOG(KURS)	-3.84E-05	4.31E-05	-0.890302	0.3850
EG_NAS	0.000338	0.002459	0.137295	0.8923
TB_DEPOSITO	0.003293	0.003424	0.961584	0.3490
LOG(UMK)	-0.000542	0.000701	-0.772210	0.4500
LOG(KONSRT_JOGJA)	0.001190	0.001339	0.888770	0.3859

R-squared	0.107198	Mean dependent var	0.000219
Adjusted R-squared	-0.140803	S.D. dependent var	0.000298
S.E. of regression	0.000318	Akaike info criterion	-13.05526
Sum squared resid	1.82E-06	Schwarz criterion	-12.76075
Log likelihood	162.6631	Hannan-Quinn criter.	-12.97712
F-statistic	0.432248	Durbin-Watson stat	2.432136
Prob(F-statistic)	0.820199		

---

# **EVALUASI ROAD MAP PENGENDALIAN INFLASI 2022- 2024**



# ROAD MAP PENGENDALIAN INFLASI KOTA YOGYAKARTA 2022-2024

STRATEGI KUNCI 4K	PROGRAM	SUB PROGRAM
1. Keterjangkauan harga	Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting	Pemantauan harga bahan pokok di pasar rakyat secara reguler
		Optimalisasi KIOS SEGORO AMARTO sebagai informasi dan pembanding harga mbagi masyarakat
		Efektivitas kegiatan operasi pasar terbuka (Minyak Goreng, Gula Pasir, Beras, Terigu dan komoditas lain)
		Program Pasar Murah melalui pendistribusian barang kebutuhan pokok secara bundling
		Pemantauan harga dan stok bahan pokok menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN)
2. Ketersediaan Pasokan	Ketersediaan Stok Bahan Pangan Pokok	Memperkuat cadangan pangan Pemerintah
	Stabilisasi Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting lainnya	Pengembangan kawasan pangan lestari
		Penyuluhan stabilisasi ketersediaan LPG bersubsidi
		Pengawasan ketersediaan LPG bersubsidi di tingkat agen dan pangkalan
		Pengawasan bahan bakar minyak di tingkat SPBU
		Diseminasi dan Sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok & Barang penting lainnya.
3. Kelancaran Distribusi	Meningkatnya Infrastruktur Perdagangan	Peyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan
4. Komunikasi Efektif	Komunikasi Efektif	Sosialisasi Program dan Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah
		Penyebaran Informasi perkembangan harga bahan pokok di <b>Aplikasi Jogja Smart Service</b>

# EVALUASI PELAKSANAAN SUB PROGRAM

STRATEGI KUNCI 4K	PROGRAM	SUB PROGRAM	KETERANGAN	
1. Keterjangkauan harga	Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting	Pemantauan harga bahan pokok di pasar rakyat secara reguler	<p>Secara keseluruhan, program Pemantauan Harga Bahan Pokok di Pasar Rakyat di Yogyakarta antara 2023 hingga 2024 telah memberikan dampak positif dalam pengendalian inflasi, terutama dalam hal <b>deteksi dini lonjakan harga dan pengendalian pasokan barang</b>. Namun, program ini menghadapi berbagai tantangan yang <b>perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan pemantauan harga</b>. Ke depan, kebijakan ini perlu lebih diperkuat dengan penggunaan teknologi, peningkatan koordinasi antar pihak terkait, serta kebijakan distribusi yang lebih efisien dan berkelanjutan.</p>	<p>Pemantauan harga bahan pokok perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang lebih baik, seperti <b>aplikasi berbasis data real-time untuk memantau harga di seluruh pasar rakyat</b>. Dengan adanya data yang akurat dan cepat, pemerintah dapat lebih responsif terhadap lonjakan harga.</p>
			<p>Metode Pemantauan: 1. <b>Pengumpulan Data Harga</b>: Pemantauan harga dilakukan dengan cara mengumpulkan data harga bahan pokok di berbagai pasar rakyat di Yogyakarta. Tim pemantau biasanya terdiri dari petugas Dinas Perdagangan, petugas pasar, dan pihak terkait lainnya. 2. <b>Survei Pasar</b>: Pemerintah daerah melakukan survei secara langsung di pasar tradisional untuk memantau harga komoditas seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang, telur, daging ayam, dan lainnya. Pemantauan ini dilakukan secara rutin, baik mingguan maupun bulanan. 3. <b>Penggunaan Teknologi</b>: Beberapa daerah juga mulai menggunakan teknologi informasi untuk memantau harga barang secara online dan real-time. Misalnya, aplikasi atau situs web yang menyediakan data harga bahan pokok yang dapat diakses oleh masyarakat dan pemerintah.</p>	<p>Perlu ada koordinasi yang lebih erat antara pemerintah, pedagang pasar, dan masyarakat agar masalah harga yang tiba-tiba melonjak bisa lebih cepat ditangani. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan harga yang lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan pasokan barang.</p>
				<p>Teknologi seperti big data dapat membantu menganalisis tren harga dan proyeksi kebutuhan pasar lebih akurat. Dengan memanfaatkan data ini, pemerintah bisa membuat kebijakan lebih tepat sasaran dan lebih cepat dalam mengantisipasi lonjakan harga.</p>

STRATEGI KUNCI 4K	PROGRAM	SUB PROGRAM	KETERANGAN	
			<p>Program Optimalisasi KIOS SEGORO AMARTO di Kota Yogyakarta adalah salah satu inisiatif yang bertujuan untuk memberikan informasi harga bahan pokok yang akurat dan terkini kepada masyarakat. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam membandingkan harga barang kebutuhan pokok di berbagai pasar, serta memberikan transparansi dalam transaksi perdagangan, yang pada gilirannya berfungsi sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi. <b>Kios Segoro Amarta yang berada di tiga titik pasar yaitu Pasar Beringharjo, Pasar Kranggan dan</b></p>	<p>Program ini membantu pengendalian inflasi pada level mikro, yakni di pasar-pasar tradisional, dengan cara memberikan tekanan terhadap pedagang untuk menetapkan harga yang wajar dan sesuai dengan pasokan barang. Namun, <b>program ini hanya bisa berfungsi optimal jika didukung dengan kebijakan lain yang lebih makro, seperti kebijakan pengendalian pasokan dan distribusi yang lebih baik dari pemerintah pusat.</b></p>
		<p>Optimalisasi KIOS SEGORO AMARTO sebagai informasi dan pembanding harga mbagi masyarakat. <b>Fungsi Kios Segoro Amarto didirikan bukan sebagai pesaing bagi para pedagang pasar. Tetapi, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Kota Yogyakarta serta menjadi rujukan harga-harga kebutuhan pokok di pasar.</b></p>	<p>KIOS SEGORO AMARTO cukup efektif dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui harga bahan pokok yang sedang berlaku di pasar. Masyarakat dapat membandingkan harga antar pasar dan memilih tempat berbelanja dengan harga terbaik, sehingga dapat mencegah terjadinya harga yang terlalu tinggi akibat monopoli pasar atau spekulasi harga. Namun, untuk beberapa kelompok masyarakat, terutama yang tidak terbiasa menggunakan teknologi (seperti lansia), akses ke platform ini mungkin masih terbatas. Ini menjadi tantangan yang harus diperbaiki agar program ini lebih inklusif.</p>	<p>Agar program ini lebih inklusif, sebaiknya ada upaya untuk mempermudah akses masyarakat yang tidak terbiasa dengan teknologi. Pemerintah bisa mengembangkan sistem informasi yang tidak hanya berbasis aplikasi atau situs web, tetapi juga berbasis SMS atau platform komunikasi lain yang lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.</p>
			<p>Keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif dari pedagang pasar. Jika pedagang tidak sepenuhnya berkomitmen untuk mengikuti program, maka data yang disajikan bisa tidak representatif dan kurang efektif dalam memberikan informasi yang valid kepada konsumen.</p>	<p>Untuk memastikan data yang disajikan akurat dan konsisten, pemerintah perlu mengembangkan sistem verifikasi yang lebih ketat terhadap harga yang dilaporkan oleh pedagang. Ini bisa melibatkan pengawasan rutin oleh tim pemantau harga atau menggunakan teknologi berbasis sensor atau QR code untuk mencatat harga barang di pasar.</p>
				<p>Program ini harus diintegrasikan dengan kebijakan pengendalian inflasi yang lebih luas, seperti kebijakan harga dasar atau subsidi bahan pokok. Program ini bisa menjadi bagian dari upaya yang lebih besar untuk menciptakan kestabilan harga yang berkelanjutan.</p>

STRATEGI KUNCI 4K	PROGRAM	SUB PROGRAM	KETERANGAN	
		Efektivitas kegiatan operasi pasar terbuka (Minyak Goreng, Gula Pasir, Beras, Terigu dan komoditas lain)	Program Operasi Pasar Terbuka (OPT) adalah salah satu strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan inflasi, terutama terkait dengan harga bahan pokok. Di Kota Yogyakarta, kegiatan operasi pasar terbuka untuk komoditas seperti minyak goreng, gula pasir, beras, terigu, dan komoditas lainnya, dilaksanakan dengan tujuan untuk menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan barang yang terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.	Operasi pasar sering menjadi andalan dalam mengendalikan inflasi, namun perlu dievaluasi seberapa efektif kebijakan ini dalam jangka panjang. Mungkin perlu pengembangan program jangka panjang yang mencakup perbaikan sistem distribusi dan pemasokan barang dari hulu ke hilir
			Secara keseluruhan, Program Operasi Pasar Terbuka di Kota Yogyakarta pada tahun 2023-2024 memiliki dampak yang signifikan terhadap pengendalian inflasi, terutama dalam menstabilkan harga barang kebutuhan pokok.	Untuk menghindari penyalahgunaan, pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap distribusi dan penjualan barang. Penegakan aturan yang ketat terhadap pedagang yang menjual barang hasil operasi pasar dengan harga tinggi atau menimbun barang akan meningkatkan efektivitas program ini.
			Salah satu tantangan terbesar dalam operasi pasar adalah ketersediaan pasokan yang terbatas. Program ini hanya bisa menyalurkan barang dalam jumlah tertentu, dan ketika permintaan tinggi, stok barang dapat habis dalam waktu singkat.	Pemerintah bisa memperluas kerjasama dengan sektor swasta atau distributor besar untuk mendapatkan pasokan barang dengan harga grosir yang lebih murah dan memastikan pasokan barang lebih banyak lagi untuk program OPT.
			Pengawasan yang kurang ketat terhadap pelaksanaan operasi pasar dapat menimbulkan masalah, seperti penyalahgunaan program oleh pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi, atau distribusi yang tidak merata.	

STRATEGI KUNCI 4K	PROGRAM	SUB PROGRAM	KETERANGAN	
		<p><b>Program Pasar Murah melalui pendistribusian barang kebutuhan pokok secara bundling</b></p>	<p>Secara keseluruhan, Program Pasar Murah Bundling di Kota Yogyakarta pada tahun 2023-2024 telah memberikan dampak positif dalam pengendalian inflasi, terutama dalam menstabilkan harga barang kebutuhan pokok dan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Program ini juga membantu menurunkan tekanan inflasi dan memperbaiki daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga. Namun, terdapat tantangan dalam hal pasokan, distribusi, dan pengawasan yang perlu diperbaiki untuk memastikan keberhasilan program ini di masa mendatang.</p>	<p>Untuk mengatasi keterbatasan pasokan, pemerintah harus meningkatkan <b>kerjasama dengan distributor besar dan produsen untuk memastikan barang tersedia dalam jumlah yang cukup</b>. Selain itu, memperluas kerjasama dengan toko-toko dan pasar lainnya bisa meningkatkan distribusi barang.</p>
			<p><b>Salah satu kendala utama dalam program pasar murah bundling adalah keterbatasan pasokan barang.</b> Meskipun barang yang dibundling sudah disiapkan dengan harga terjangkau, terkadang pasokan tidak mencukupi permintaan masyarakat yang sangat tinggi, terutama jika program ini dilakukan di wilayah dengan banyak masyarakat yang membutuhkan.</p>	<p>Untuk mencegah penimbunan atau pembelian berlebihan, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat di lapangan. <b>Pembatasan jumlah pembelian per orang atau rumah tangga harus ditegakkan dengan tegas.</b></p>
			<p>Kadang-kadang, <b>distribusi barang pasar murah bisa tidak merata</b>, dengan beberapa lokasi yang tidak mendapat pasokan cukup atau tidak memiliki akses yang baik. Hal ini dapat mengurangi efektivitas program dalam menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.</p>	
			<p>Program ini rentan terhadap penimbunan barang oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan dari harga murah. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa barang yang dibundling hanya dibeli oleh mereka yang membutuhkan.</p>	

STRATEGI KUNCI 4K	PROGRAM	SUB PROGRAM	KETERANGAN	
		<p><b>Pemantauan harga dan stok bahan pokok menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN)</b></p>	<p>Secara keseluruhan, pemantauan harga dan stok bahan pokok menjelang HBKN di Kota Yogyakarta selama tahun 2022-2024 telah memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang. Program ini efektif dalam mengendalikan inflasi dan memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses barang-barang pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, tantangan terkait distribusi, pasokan, dan pengawasan masih ada, yang memerlukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang.</p>	<p>Agar pemantauan bisa lebih efektif, perlu adanya peningkatan kapasitas tim pemantau dengan pelatihan mengenai teknik survei yang lebih efisien, serta penggunaan teknologi yang lebih canggih, seperti aplikasi atau sistem informasi untuk memantau harga dan stok secara real-time.</p>
				<p>Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memperkuat koordinasi dengan perusahaan logistik dan distribusi, untuk mengurangi potensi hambatan dalam distribusi bahan pokok dan memastikan pasokan yang tepat waktu.</p>

STRATEGI KUNCI 4K	PROGRAM	SUB PROGRAM	KETERANGAN	
2. Ketersediaan Pasokan	Ketersediaan Stok Bahan Pangan Pokok	Memperkuat cadangan pangan Pemerintah	<p>Secara keseluruhan, program pengendalian inflasi dan penguatan cadangan pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta antara tahun 2022-2024 memiliki dampak positif terhadap stabilisasi harga pangan, tetapi masih perlu perbaikan dan inovasi dalam aspek distribusi dan koordinasi antar lembaga. Evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan yang ada akan sangat penting untuk merespons tantangan yang terus berkembang, baik di tingkat lokal maupun nasional.</p>	<p>Kerja sama yang lebih erat antara pemerintah daerah dan sektor swasta, termasuk pedagang besar dan distributor, penting untuk meningkatkan efisiensi distribusi pangan.</p>
				<p>Memperbaiki sistem informasi harga yang dapat diakses oleh masyarakat dan pelaku pasar secara real-time untuk mencegah spekulasi harga.</p>
				<p>Diversifikasi sumber pangan lokal agar tidak tergantung pada beberapa komoditas pangan tertentu yang rentan terhadap gejolak pasar global.</p>
			<p>Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata memiliki kebutuhan konsumsi yang begitu besar. Sektor pariwisata mengalami proyeksi kenaikan jumlah wisatawan pasca covid 19. Perlu dilakukan penyusunan langkah strategis untuk mengatasi hal tersebut, diantaranya dengan cara melakukan kolaborasi antar <b>daerah, diversifikasi ekonomi lokal, stabilisasi harga komoditas pertanian, dan penguatan jaring pengaman sosial. (Pendistribusian Bahan Pokok dari luar Kota Yogyakarta)</b></p>	<p>Pengembangan sistem ketahanan pangan berbasis komunitas melalui kelompok tani atau koperasi untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal.</p>

STRATEGI KUNCI 4K	PROGRAM	SUB PROGRAM	KETERANGAN	
		<p><b>Pengembangan kawasan pangan lestari</b></p>	<p>Pengembangan kawasan pangan lestari di Kota Yogyakarta adalah upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dengan memanfaatkan lahan pekarangan secara optimal. Kegiatan ini dilakukan melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang bertujuan untuk: Meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan; Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga; dan Meningkatkan pendapatan rumah tangga.</p>	<p>Mengembangkan teknik pertanian yang lebih efisien untuk ruang terbatas, seperti pertanian vertikal atau hidroponik, dapat menjadi solusi bagi keluarga yang tinggal di area dengan lahan terbatas.</p>
			<p>Dengan perbaikan-perbaikan ini, pemanfaatan pekarangan keluarga dalam program pengendalian inflasi di Yogyakarta dapat semakin efektif, memberikan dampak positif terhadap ketahanan pangan dan perekonomian keluarga, serta dapat menjadi model yang dapat diterapkan di daerah lainnya.</p>	<p>Memberikan pendampingan teknis secara terus-menerus akan membantu masyarakat dalam mengatasi kendala dan memaksimalkan hasil pertanian pekarangan mereka.</p>
			<p>Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kota Yogyakarta berada di Kemantren Tegalrejo dan Kemantren Jetis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemantren Tegalrejo: Kegiatan P2L dilakukan di Kelurahan Tegalrejo.</li> <li>2. Kemantren Jetis: Kampung Pangan Lestari Sami Mulyo berada di Kelurahan Cokrodiningratan.</li> </ol>	<p>Meningkatkan akses ke pasar lokal untuk menjual produk hasil pertanian dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan mempercepat proses distribusi pangan lokal.</p>

STRATEGI KUNCI 4K	PROGRAM	SUB PROGRAM	KETERANGAN	
	Stabilisasi Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting lainnya	Penyuluhan stabilisasi ketersediaan LPG bersubsidi	Kota Yogyakarta, seperti banyak daerah lain di Indonesia, mengalami dampak inflasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah ketidakstabilan harga dan distribusi barang-barang kebutuhan pokok, termasuk energi rumah tangga seperti LPG bersubsidi. Inflasi yang terjadi seringkali dipicu oleh gangguan pasokan barang atau kenaikan harga energi, yang kemudian mempengaruhi daya beli masyarakat.	Mengembangkan kebijakan yang mendorong masyarakat untuk beralih ke energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan tidak bergantung sepenuhnya pada LPG.
			Masih ada kecenderungan masyarakat untuk mengandalkan LPG bersubsidi meskipun mereka mampu membeli LPG non-subsidi, yang berpotensi meningkatkan beban anggaran subsidi pemerintah.	Penyuluhan harus lebih intensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak swasta, dengan pendekatan yang lebih kreatif dan berbasis teknologi.
			Meskipun telah dilakukan penyuluhan, sebagian masyarakat masih menggunakan LPG secara berlebihan atau tidak sesuai dengan kebutuhan, yang berkontribusi pada pemborosan.	

STRATEGI KUNCI 4K	PROGRAM	SUB PROGRAM	KETERANGAN	
		Pengawasan ketersediaan LPG bersubsidi di tingkat agen dan pangkalan	Program pengendalian inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2022-2024 terkait dengan pengawasan ketersediaan LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi di tingkat agen dan pangkalan merupakan upaya yang penting untuk menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan memastikan distribusi yang adil kepada masyarakat. LPG bersubsidi merupakan salah satu komoditas yang sangat berpengaruh dalam perekonomian domestik, terutama di daerah dengan banyak rumah tangga menengah ke bawah. Dalam hal ini, pengawasan terhadap distribusi dan ketersediaan LPG bersubsidi menjadi faktor kunci dalam pengendalian inflasi di Yogyakarta.	Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau stok LPG di agen dan pangkalan secara real-time. Aplikasi berbasis GPS atau sistem manajemen pasokan berbasis cloud dapat membantu melacak distribusi dan stok LPG di setiap titik distribusi, memastikan tidak ada kekurangan pasokan.
			Secara keseluruhan, program pengendalian inflasi Kota Yogyakarta yang berfokus pada pengawasan ketersediaan LPG bersubsidi di tingkat agen dan pangkalan telah memberikan dampak positif dalam menjaga kestabilan harga dan distribusi yang lebih terkontrol. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi agar program ini lebih efektif di masa mendatang. Evaluasi yang berkelanjutan dan perbaikan dalam hal teknologi pengawasan, distribusi yang merata, serta peningkatan pengawasan terhadap agen dan pangkalan akan sangat membantu dalam pengendalian inflasi jangka panjang.	Agar distribusi LPG bersubsidi tetap tepat sasaran, perlu ada edukasi lebih lanjut kepada agen dan pangkalan mengenai pentingnya distribusi yang sesuai dengan HET dan sasaran subsidi. Pelatihan dan pengawasan lebih ketat dapat membantu mengurangi penyalahgunaan.
			Distribusi LPG bersubsidi tidak merata di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, yang menyebabkan kelangkaan di beberapa area, meskipun di area lain stok LPG tersedia berlebihan.	Masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka dalam mendapatkan LPG bersubsidi, serta cara melaporkan praktik penyelewengan jika ditemukan.
			Beberapa agen atau pangkalan mungkin masih terlibat dalam praktik penimbunan atau penjualan LPG bersubsidi ke pasar bebas dengan harga yang lebih tinggi, yang merugikan konsumen.	Pemerintah dapat meningkatkan intensitas pengawasan dan melakukan inspeksi mendadak ke pangkalan-pangkalan LPG untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam distribusi.

STRATEGI KUNCI 4K	PROGRAM	SUB PROGRAM	KETERANGAN	
		<b>Pengawasan bahan bakar minyak di tingkat SPBU</b>	Program pengendalian inflasi yang berkaitan dengan pengawasan BBM di Yogyakarta antara tahun 2022 hingga 2024 cukup efektif dalam menjaga kestabilan harga bahan bakar dan mencegah lonjakan inflasi.	Penggunaan teknologi yang lebih canggih, seperti sistem GPS pada kendaraan pengangkut BBM dan aplikasi pelaporan harga secara real-time, akan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi BBM.
			Tingkat kepatuhan SPBU terhadap harga dan kuota yang telah ditetapkan perlu dievaluasi. Pengawasan yang efektif bisa mengurangi praktik curang seperti penjualan BBM bersubsidi kepada konsumen yang tidak berhak, serta menghindari praktek penimbunan BBM yang dapat menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga.	Diperlukan pelatihan lebih lanjut bagi aparat pengawas di lapangan agar dapat mengidentifikasi dan menindaklanjuti potensi pelanggaran dengan lebih cepat dan tepat.
			Dalam rangka meningkatkan pengawasan, perlu ada saluran komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah daerah, termasuk mekanisme pelaporan terkait SPBU yang diduga melakukan pelanggaran. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya pengawasan BBM untuk mendukung pengendalian inflasi.	Program pengendalian inflasi yang melibatkan BBM perlu dilaksanakan dengan koordinasi yang lebih erat antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pertamina. Ini termasuk pemantauan distribusi dan harga di SPBU agar tidak terjadi penyelewengan atau ketidakseimbangan pasokan.

STRATEGI KUNCI 4K	PROGRAM	SUB PROGRAM	KETERANGAN	
		<p><b>Diseminasi dan Sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok &amp; Barang penting lainnya.</b></p>	<p>Diseminasi dalam konteks ini merujuk pada penyebaran informasi mengenai kebijakan pengendalian inflasi dan distribusi barang kepada masyarakat, baik itu petani, pedagang, maupun konsumen. Sedangkan sinkronisasi berarti adanya keselarasan dan koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam pengadaan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.</p>	<p>Pemerintah Kota Yogyakarta bisa meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk memberikan update harga secara real-time dan melibatkan masyarakat lebih aktif dalam melaporkan harga.</p>
<p>Ketergantungan pada distribusi barang dari luar daerah atau luar pulau, serta faktor alam seperti bencana alam yang mempengaruhi pasokan pangan.</p>	<p>Memperbaiki sistem distribusi barang untuk memastikan tidak ada hambatan logistik yang menyebabkan kelangkaan barang atau lonjakan harga.</p>			
<p>Meskipun diseminasi dilakukan, ada kemungkinan informasi tidak sampai dengan merata kepada seluruh lapisan masyarakat.</p>	<p>Edukasi tentang pengelolaan anggaran rumah tangga, cara menghindari panic buying, serta cara memilih barang yang harganya lebih stabil dapat membantu menurunkan tekanan permintaan yang berlebihan pada saat tertentu.</p>			
<p>Harga barang pokok yang sering mengalami fluktuasi meskipun sudah ada upaya pengendalian, misalnya harga cabai, brambang atau komoditas lain yang dipengaruhi oleh faktor musiman.</p>				

STRATEGI KUNCI 4K	PROGRAM	SUB PROGRAM	KETERANGAN	
3. Kelancaran Distribusi	Meningkatnya Infrastruktur Perdagangan	Peyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan	Secara keseluruhan, kebijakan pengendalian inflasi terkait distribusi barang kebutuhan pokok di Yogyakarta melalui penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan menunjukkan adanya dampak positif, namun perbaikan berkelanjutan dalam hal infrastruktur, teknologi, dan koordinasi antar pihak akan sangat penting untuk mencapai hasil yang lebih optimal di masa mendatang.	Pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan untuk melanjutkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mendukung distribusi barang kebutuhan pokok, termasuk sistem transportasi yang ramah lingkungan dan efisien.
			Salah satu faktor utama yang mempengaruhi inflasi adalah biaya transportasi. Jika angkutan barang tidak efisien, biaya distribusi barang akan meningkat dan hal ini akan berimbas pada harga jual barang kebutuhan pokok. Dalam hal ini, kebijakan untuk menekan biaya transportasi, seperti perbaikan infrastruktur jalan, pengelolaan arus lalu lintas, dan penggunaan angkutan barang yang lebih efisien sangat penting untuk menurunkan inflasi.	Penggunaan teknologi untuk memonitor dan mengelola distribusi barang akan sangat berperan dalam mencegah terjadinya inflasi akibat kelangkaan barang atau gangguan distribusi. Sistem digital yang terintegrasi dengan data pasar dan logistik akan mempermudah pemantauan dan prediksi kebutuhan barang.
			Peningkatan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok, baik dari luar kota maupun antar pasar dalam kota, berpengaruh langsung terhadap kestabilan pasokan dan harga. Ketika distribusi lancar, barang akan tersedia dengan harga yang stabil. Namun, kendala dalam distribusi—baik karena kemacetan, keterlambatan, atau ketidakpastian pasokan—bisa menyebabkan kelangkaan barang yang memperburuk inflasi.	Peningkatan koordinasi antara pemerintah, distributor, dan pelaku usaha akan sangat penting dalam menjaga kelancaran distribusi barang. Kerja sama yang lebih erat antar pihak-pihak tersebut bisa mengurangi hambatan yang berpotensi meningkatkan harga.
				Program-program yang telah dijalankan perlu dievaluasi secara rutin untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, termasuk dalam hal manajemen lalu lintas, perizinan, dan pengaturan distribusi barang.

STRATEGI KUNCI 4K	PROGRAM	SUB PROGRAM	KETERANGAN	
4. Komunikasi Efektif	Komunikasi Efektif	Sosialisasi Program dan Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Secara keseluruhan, program pengendalian inflasi di Yogyakarta telah menunjukkan hasil yang positif dengan inflasi yang terkendali, meskipun tantangan seperti kenaikan harga pangan dan kelangkaan pasokan masih menjadi perhatian. Untuk ke depannya, TPID diharapkan dapat memperkuat kebijakan jangka panjang yang berfokus pada stabilisasi harga dan pasokan serta memperkuat koordinasi antar daerah	Untuk ke depannya, TPID diharapkan dapat memperkuat kebijakan jangka panjang yang berfokus pada stabilisasi harga dan pasokan serta memperkuat koordinasi antar daerah.
			TPID secara rutin menyelenggarakan kegiatan sosialisasi seperti rakor daerah dan diskusi dengan para pedagang, petani, serta masyarakat untuk menjaga ekspektasi terhadap harga dan pasokan barang pokok.	
			Untuk memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau, Pemerintah Kota Yogyakarta memanfaatkan kios Segoro Amarto yang menyediakan informasi harga dan menjadi referensi bagi masyarakat agar pedagang tidak memperlmainkan harga. Selain itu, pasar murah dan operasi pasar juga dioptimalkan untuk menstabilkan harga.	
			TPID juga berfokus pada peningkatan ketahanan pasokan pangan dengan cara memperbanyak cadangan beras dan memperluas kawasan pangan lestari serta kampung sayur. Program ini juga mencakup pengembangan rumah bibit dan kerja sama dengan kabupaten/kota di DIY untuk memperkuat pasokan.	
			Untuk mendukung kelancaran distribusi barang, TPID Yogyakarta melakukan rekayasa lalu lintas di daerah-daerah yang menjadi pusat aktivitas ekonomi, seperti pasar dan kawasan Malioboro. Ini bertujuan untuk memastikan alur distribusi berjalan lancar.	
			Program ini juga sangat mengutamakan koordinasi yang erat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan sektor swasta. Salah satu hasil evaluasi penting adalah keberhasilan dalam menjaga inflasi tetap terjaga di bawah angka yang ditargetkan, meski masih ada tantangan terkait dengan kelangkaan pasokan dan volatilitas harga pangan.	

STRATEGI KUNCI 4K	PROGRAM	SUB PROGRAM	KETERANGAN	
		<b>Penyebaran Informasi perkembangan harga bahan pokok di Aplikasi Jogja Smart Service</b>	Salah satu strategi utama yang telah diterapkan adalah sistem pemantauan harga secara periodik yang terhubung dengan pasar tradisional utama seperti Pasar Beringharjo, Kranggan, dan Demangan. Di sini, <b>Aplikasi JSS</b> berperan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi harga yang akurat kepada konsumen, guna menghindari adanya spekulasi harga yang berlebihan. Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan keberadaan kios Segoro Amarto di pasar-pasar tersebut, yang berfungsi sebagai titik referensi harga yang dapat digunakan untuk menanggulangi kenaikan harga yang tidak wajar	Aplikasi Jogja Smart Service (JSS) merupakan platform yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan layanan publik di Kota Yogyakarta, termasuk dalam hal pengendalian inflasi. Namun, meskipun memiliki potensi besar, ada beberapa kendala yang dapat memengaruhi efektivitas aplikasi ini dalam menanggulangi inflasi, terutama pada periode 2022-2024.
			Efektivitas program ini dapat dievaluasi dengan mengamati beberapa hasil, seperti penurunan inflasi di DIY yang tercatat pada 2024, meski tantangan inflasi di Kota Yogyakarta tetap ada, terutama dalam menghadapi momen-momen musiman seperti Hari Raya dan libur panjang.	Untuk mengendalikan inflasi, diperlukan koordinasi yang baik antar berbagai lembaga, baik pemerintah daerah, pusat, maupun sektor swasta. JSS mungkin mengalami kesulitan dalam menyinkronkan data dan kebijakan antar lembaga yang memiliki sistem yang berbeda, yang dapat memperlambat respon terhadap kondisi inflasi yang dinamis.
			JSS mengandalkan data yang dikumpulkan melalui platform digital. Namun, jika data yang ada tidak akurat atau tidak lengkap, maka analisis untuk merumuskan kebijakan pengendalian inflasi bisa terhambat. Misalnya, data harga barang dan kebutuhan pokok yang tidak update atau terbatas hanya pada sektor tertentu.	Aplikasi berbasis teknologi dapat menghadapi masalah teknis seperti gangguan server, bug, atau kesalahan sistem. Jika ini terjadi, proses pengumpulan data dan pemantauan inflasi bisa terganggu, yang pada gilirannya memengaruhi kebijakan pengendalian inflasi.
			Infrastruktur teknologi yang tidak merata di seluruh wilayah Yogyakarta bisa menghambat penggunaan aplikasi secara maksimal. Wilayah dengan akses internet terbatas atau infrastruktur yang belum memadai mungkin kesulitan untuk mengakses atau memanfaatkan aplikasi ini.	Menyediakan koneksi internet yang lebih stabil di seluruh wilayah kota dan meningkatkan literasi digital masyarakat agar mereka dapat lebih aktif menggunakan aplikasi ini.
			Aplikasi ini membutuhkan pemahaman dan partisipasi dari masyarakat untuk bisa mengumpulkan data secara maksimal. Tidak semua lapisan masyarakat mungkin familiar atau dapat mengakses teknologi dengan mudah, sehingga penggunaan aplikasi ini tidak merata di seluruh segmen sosial.	Memastikan data yang dikumpulkan lebih luas dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk analisis yang lebih mendalam dan akurat.
			Meskipun aplikasi ini bertujuan untuk memantau harga, tidak semua faktor penyebab inflasi dapat dicatat hanya dengan pemantauan harga barang. Inflasi dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kenaikan harga energi global atau kebijakan moneter nasional yang mungkin tidak sepenuhnya tercakup oleh aplikasi ini.	

## ISU KUNCI YANG MEMPENGARUHI STABILITAS HARGA DAN DAYA BELI MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA 2025-2027

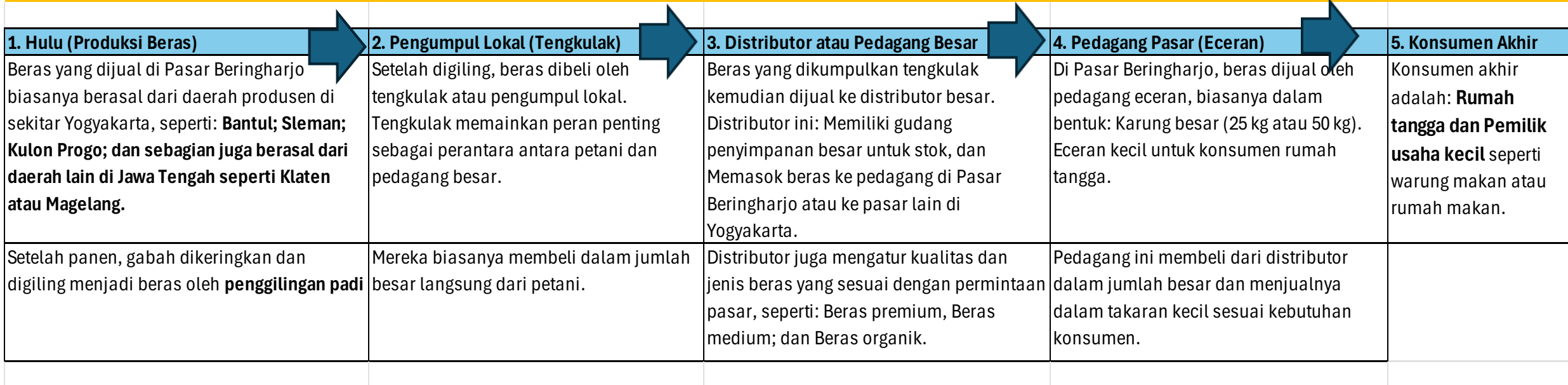
<b>INTERNAL</b>	<b>Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam Lokal:</b>	<b>Pasokan Pangan dan Pertanian</b>	
		Kota Yogyakarta sangat bergantung pada pasokan pangan lokal dari luar daerah. Ketersediaan bahan pangan seperti beras, sayuran, dan buah-buahan akan sangat berpengaruh pada inflasi.	Gangguan dalam produksi lokal (seperti akibat bencana alam, penyakit tanaman, atau fluktuasi musiman) dapat mengurangi pasokan, yang berpotensi mendorong kenaikan harga.
	<b>Kebijakan Pemerintah Daerah</b>	<b>Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Lokal</b>	
		Kebijakan fiskal pemerintah daerah seperti pajak daerah, subsidi pangan, dan pembatasan harga barang tertentu akan sangat mempengaruhi inflasi. Misalnya, jika ada kebijakan untuk meningkatkan pajak barang-barang tertentu atau menaikkan biaya sewa lahan atau perumahan, ini bisa mendorong kenaikan biaya hidup.	Kebijakan yang mendukung peningkatan PAD melalui peningkatan pajak hotel dan restoran dapat menyebabkan lonjakan harga makanan.
	<b>Kondisi Infrastruktur dan</b>	<b>Biaya Transportasi dan Distribusi Barang</b>	
		Infrastruktur transportasi yang buruk atau tidak efisien dapat menyebabkan biaya distribusi barang naik, sehingga harga barang-barang pokok ikut terpengaruh.	Jika ada gangguan atau keterlambatan dalam sistem transportasi dan distribusi, harga barang akan mengalami lonjakan.
	<b>Konsumsi Masyarakat</b>	<b>Pertumbuhan Penduduk dan Perubahan Pola Konsumsi</b>	
		Kenaikan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi di masyarakat dapat mempengaruhi permintaan barang dan jasa. Jika terjadi peningkatan permintaan terhadap barang-barang tertentu, harga bisa meningkat.	Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang lebih pesat di Yogyakarta bisa menyebabkan permintaan terhadap rumah tinggal dan kebutuhan pangan meningkat, yang berpotensi memicu inflasi.
	<b>Sektor Pariwisata</b>	<b>Kembalinya Sektor Pariwisata Pasca-Pandemi</b>	
	Yogyakarta sebagai tujuan wisata utama di Indonesia mungkin melihat peningkatan jumlah wisatawan dalam beberapa tahun mendatang setelah pemulihan pasca-pandemi.	Kenaikan jumlah wisatawan dapat menyebabkan lonjakan permintaan terhadap akomodasi, makanan, dan barang konsumsi lainnya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi inflasi daerah.	
<b>Kota Pelajar</b>	<b>Mahasiswa dan Peningkatan Permintaan Barang</b>		
	Mahasiswa dari berbagai daerah yang menuntut ilmu di Yogyakarta meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa seperti makanan, transportasi, sewa tempat tinggal, dan kebutuhan harian lainnya.	Kenaikan permintaan pada restoran, warung makan, dan produk makanan cepat saji dapat menyebabkan kenaikan harga pangan lokal.	

## ISU KUNCI YANG MEMPENGARUHI STABILITAS HARGA DAN DAYA BELI MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA 2025-2027

		Fluktuasi Harga Komoditas Global	Prediksi
<b>EKSTERNAL</b>	<b>Kondisi Ekonomi Global</b>	Harga bahan bakar, pangan (terutama pangan pokok seperti gandum, beras, dan minyak), serta komoditas lain yang dipengaruhi oleh dinamika pasar global dapat berpengaruh langsung pada inflasi Indonesia, termasuk Kota Yogyakarta.	Ketidakpastian geopolitik, seperti konflik internasional atau gangguan pasokan bahan bakar dan pangan, dapat menyebabkan lonjakan harga komoditas. Peristiwa besar seperti ketegangan perdagangan antara negara besar atau krisis energi dapat memicu kenaikan harga barang-barang pokok.
		<b>Harga Minyak Dunia</b>	
		Harga minyak mentah dunia memengaruhi berbagai aspek ekonomi secara langsung, terutama melalui perubahan harga bahan bakar. Kota Yogyakarta, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, sangat terpengaruh oleh kebijakan energi nasional yang ditentukan oleh harga minyak global.	Bank Dunia memproyeksikan rata-rata harga minyak mentah Brent pada 2025 bisa mencapai <b>US\$73 per barel</b> . Harganya turun 8,8% dibanding 2024 yang rata-ratanya diperkirakan US\$80 per barel.
		<b>Kebijakan Ekonomi Negara Mitra Dagang</b>	
		Kinerja ekonomi negara-negara mitra dagang utama Indonesia (misalnya China, Amerika Serikat, Jepang) dapat mempengaruhi impor dan ekspor. Perlambatan ekonomi global dapat menurunkan permintaan terhadap produk Indonesia, termasuk hasil pertanian atau industri di Yogyakarta.	Jika ekonomi negara-negara besar mengalami resesi atau penurunan permintaan, ini bisa mengurangi pendapatan daerah dan berujung pada pengurangan daya beli masyarakat.
		<b>Perubahan Iklim dan Bencana Alam</b>	
		Kota Yogyakarta, yang terletak dekat dengan daerah rawan bencana seperti gunung berapi Merapi dan rawan banjir, dapat terkena dampak dari perubahan iklim global, yang dapat menyebabkan kerusakan pada hasil pertanian dan infrastruktur.	Peningkatan frekuensi bencana alam (erupsi gunung berapi, banjir, atau cuaca ekstrem) dapat mengganggu pasokan pangan dan barang lainnya, memicu kenaikan harga dan inflasi daerah.
		<b>Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah</b>	
		Kebijakan suku bunga yang diterapkan oleh Bank Indonesia atau bank sentral negara besar seperti Federal Reserve dapat memengaruhi nilai tukar rupiah. Depresiasi nilai tukar rupiah akan meningkatkan biaya impor, terutama barang-barang yang bergantung pada bahan baku dari luar negeri.	Jika dolar AS menguat atau ada tekanan terhadap mata uang Indonesia, ini dapat menyebabkan harga barang impor naik, meningkatkan biaya barang dan jasa di Yogyakarta.
	<b>Harga Emas</b>		
	Harga emas memiliki hubungan tidak langsung tetapi signifikan dengan inflasi, termasuk di Kota Yogyakarta. Emas sering menjadi indikator dan instrumen yang mempengaruhi kondisi ekonomi secara lebih luas.	Ketika harga emas naik tajam, masyarakat sering kali menganggap bahwa inflasi akan meningkat, meskipun secara riil belum tentu terjadi.	
	Yogyakarta dikenal dengan industri perhiasan dan kerajinan berbasis logam mulia. Harga emas yang tinggi dapat memengaruhi biaya produksi.		

# RANTAI PASOKAN BERAS

Rantai pasokan beras di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, melibatkan beberapa pihak dari hulu hingga hilir. Proses ini mencakup produsen (petani), perantara, distributor, pedagang, dan konsumen.



Jumlah cadangan beras itu sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 24 tahun 2016 tentang cadangan pangan pemerintah daerah dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta nomor 22 tahun 2019 tentang cadangan beras Pemkot Yogyakarta.

**Minimal 120 Ton**

Pemkot Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menandatangani perjanjian kerja sama mengenai pengendalian inflasi pada bulan November 2023. Salah satu implementasi dari kerja sama ini adalah pengiriman pasokan beras dari Bantul ke berbagai pasar di Kota Yogyakarta. Total distribusi pasokan beras dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bantul ke Yogyakarta mencapai sekitar 6,3 ton, yang didistribusikan ke Pasar Beringharjo, Prawirotaman, Kranggan, Demangan, Sentul, dan Kotagede.

## Ciri Khusus Rantai Pasokan di Pasar Beringharjo

1. Lokasi Strategis: Pasar Beringharjo menjadi pusat distribusi untuk kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta.
2. Beragam Kualitas: Pedagang menyediakan berbagai jenis dan kualitas beras untuk menjangkau berbagai segmen pembeli.
2. Penjualan Langsung: Konsumen dapat membeli langsung dalam jumlah kecil tanpa harus melalui perantara tambahan.



## Tantangan dalam Rantai Pasokan


1. **Fluktuasi Harga:** Harga beras sering berubah akibat faktor cuaca, musim panen, dan kebijakan pemerintah.
2. **Ketergantungan pada Distributor:** Pedagang kecil sangat tergantung pada distributor besar dalam pasokan beras.
3. **Biaya Logistik:** Ongkos transportasi memengaruhi harga akhir beras, terutama jika pasokan berasal dari luar daerah.



Dengan pengelolaan yang baik, rantai pasokan beras di Pasar Beringharjo membantu menjaga pasokan stabil dan harga kompetitif di wilayah Kota Yogyakarta.

# RANTAI PASOKAN LPG

Rantai pasokan LPG (Liquefied Petroleum Gas) di Kota Yogyakarta melibatkan berbagai tahapan mulai dari produksi hingga ke konsumen akhir.

Agen LPG	Pengecer atau Sub-Agen		Konsumen Akhir
<p>Agen adalah pihak resmi yang bekerja sama dengan Pertamina untuk mendistribusikan LPG dalam jumlah besar. Mereka menjual LPG kepada pengecer (sub-agen) dan konsumen langsung.</p>	<p>Pengecer membeli LPG dari agen untuk dijual dalam jumlah kecil langsung ke konsumen, seperti rumah tangga, pedagang kecil, atau usaha mikro.</p>		<p>LPG akhirnya dibeli oleh konsumen, termasuk rumah tangga, pelaku usaha kecil, restoran, dan industri kecil lainnya.</p>
<p>Agen LPG di Kota Yogyakarta berada di berbagai lokasi strategis untuk melayani permintaan konsumen.</p>			
<h2>Tantangan dalam Rantai Pasokan LPG</h2>			<h3>STRATEGI PENGENDALIAN</h3>
<p><b>Ketergantungan pada Pasokan dari Kilang Tertentu:</b></p>			<p><b>Pengawasan Ketat LPG Bersubsidi:</b></p>
<p>Ketergantungan pada kilang-kilang tertentu (misalnya Cilacap atau Balongan) dapat menyebabkan keterlambatan distribusi jika terjadi gangguan logistik.</p>			<p>Pemkot Yogyakarta dapat bekerja sama dengan Pertamina untuk memantau penjualan</p>
<p><b>Ketersediaan LPG Subsidi:</b></p>			<p><b>Penindakan Penyimpangan:</b></p>
<p>Tabung LPG 3 kg sering mengalami kelangkaan karena permintaan tinggi dan penyalahgunaan oleh konsumen non-subsidi.</p>			<p>Menindak tegas agen atau pengecer yang menjual LPG bersubsidi kepada konsumen non-subsidi</p>
<p><b>Fluktuasi Harga:</b></p>			<p><b>Harga Acuan Daerah:</b></p>
<p>Harga LPG non-subsidi seperti tabung 5,5 kg dan 12 kg fluktuatif karena dipengaruhi oleh harga minyak dunia.</p>			<p>Pemerintah daerah dapat mengawasi implementasi Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG bersubsidi</p>
<p><b>Penyimpangan Distribusi:</b></p>			<p><b>Subsidi LPG Tepat Sasaran:</b></p>
<p>Ada potensi distribusi yang tidak tepat sasaran, seperti LPG bersubsidi dijual kepada usaha besar atau konsumen yang tidak berhak.</p>			<p>Mengembangkan skema subsidi langsung (misalnya melalui voucher digital) agar LPG bersubsidi tepat sasaran</p>
			<p><b>Subsidi Kompor Listrik:</b></p>
			<p>Bekerja sama dengan PLN untuk mempercepat konversi dari LPG ke kompor listrik di daerah-daerah</p>
			<p><b>Edukasi Konsumen:</b></p>
			<p>Menedukasi masyarakat tentang perbedaan LPG subsidi dan non-subsidi, serta pentingnya menggunakan LPG bersubsidi</p>

# RANTAI PASOKAN CABE & BRAMBANG

Pasar Beringharjo adalah salah satu pasar utama di Kota Yogyakarta yang menjadi pusat distribusi berbagai kebutuhan pokok, termasuk cabai dan bawang merah (brambang).

Produksi di Daerah Penghasil:	Pengumpulan oleh Tengkulak dan Distributor	Distribusi ke Pedagang Grosir di Pasar Beringharjo	Penjualan oleh Pedagang Eceran	Konsumen Akhir
Cabai dan bawang merah umumnya diproduksi di daerah pertanian seperti <b>Bantul, Kulon Progo, Sleman, Temanggung, dan Brebes</b> .	<b>Tengkulak (Middlemen):</b> Petani menjual hasil panen mereka kepada tengkulak setempat. Tengkulak biasanya membeli dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali ke distributor di kota.	Distributor mengantarkan cabai dan brambang ke pedagang grosir di Pasar Beringharjo. Grosir ini menyediakan dalam jumlah besar untuk dijual ke pedagang eceran.	Pedagang eceran membeli dari grosir dan menjual langsung kepada konsumen di pasar.	Cabai dan brambang akhirnya dibeli oleh masyarakat umum, termasuk rumah tangga, pengusaha kuliner, dan pedagang makanan kecil.
Daerah-daerah ini berfungsi sebagai produsen utama yang memasok kebutuhan Pasar Beringharjo.	<b>Distributor/Pengepul:</b> Distributor berperan sebagai perantara utama yang membawa hasil panen dari daerah produksi ke Kota Yogyakarta.			

## Tantangan dalam Rantai Pasokan Cabai & Brambang

<b>Ketergantungan pada Daerah Tertentu:</b> Sebagian besar cabai dan bawang merah di Yogyakarta bergantung pada pasokan dari daerah tertentu, seperti Brebes (untuk bawang merah) dan Magelang atau Bantul (untuk cabai).
<b>Fluktuasi Harga di Tingkat Petani:</b> Harga cabai dan brambang di tingkat petani sering kali tidak stabil karena pengaruh cuaca, musim panen, dan serangan hama.
<b>Biaya Distribusi Tinggi:</b> Jarak yang jauh dari daerah penghasil dan keterbatasan infrastruktur logistik dapat menyebabkan harga naik.
<b>Peran Tengkulak:</b> Tengkulak sering memonopoli harga, sehingga harga di pasar menjadi tinggi.
<b>Keterbatasan Gudang Penyimpanan:</b> Tidak adanya fasilitas penyimpanan yang memadai menyebabkan pasokan tidak bisa disimpan untuk jangka panjang.



## STRATEGI PENGENDALIAN

<b>Penguatan Produksi Lokal:</b> Kota Yogyakarta dapat bekerja sama dengan daerah sekitarnya seperti Bantul dan Sleman untuk meningkatkan produksi cabai melalui:
<b>Bantuan subsidi pupuk dan pestisida</b> bagi petani.
<b>Pelatihan budidaya modern</b> seperti penggunaan varietas unggul dan pertanian hidroponik.
<b>Diversifikasi Sumber Pasokan:</b> Kota Yogyakarta harus menjalin kerja sama dengan daerah-daerah lain seperti Kulon Progo, Magelang, atau Temanggung agar pasokan tidak hanya bergantung pada satu wilayah.
<b>Pemangkasan Rantai Pasokan:</b> Mendorong pembelian langsung dari petani melalui kerja sama antara Dinas Pertanian Kota Yogyakarta dengan kelompok tani. Ini
<b>Penggunaan Pasar Induk:</b> Pasar Induk Giwangan dioptimalkan sebagai pusat distribusi untuk menyalurkan cabai langsung dari petani ke pedagang Pasar
<b>Subsidi Transportasi:</b> Pemerintah dapat memberikan subsidi transportasi untuk mengurangi biaya distribusi.
<b>Pengembangan Gudang Penyimpanan Dingin:</b> Pemerintah Kota Yogyakarta dapat membangun <b>Cold Storage</b> di lokasi strategis untuk menyimpan cabai dan brambang saat panen melimpah, sehingga dapat digunakan saat pasokan kurang.
<b>Pengelolaan Lumbung Pangan:</b> Membentuk lumbung pangan khusus cabai di tingkat desa atau kecamatan untuk menjaga ketersediaan saat harga mulai naik.

# OPERASI PASAR TERBUKA

Operasi Pasar Terbuka (OPT) adalah salah satu mekanisme pemerintah untuk mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok, terutama saat terjadi lonjakan harga. Di Kota Yogyakarta, pelaksanaan OPT diatur melalui **Standar Operasional Prosedur (SOP)** yang melibatkan Pemda, Bulog, distributor, dan pedagang lokal. Berikut adalah proses dan mekanisme SOP-nya:

Identifikasi dan Analisis Pasar	Koordinasi dengan Pihak Terkait	Penetapan Lokasi Operasi Pasar	Distribusi Barang dan Penjualan Langsung	Monitoring dan Evaluasi
Pemerintah daerah dan instansi terkait (misalnya Bulog, Dinas Perdagangan) menganalisis kenaikan harga bahan pokok dan menentukan tingkat kebutuhan masyarakat.	Pemerintah bekerja sama dengan distributor, produsen, dan lembaga logistik seperti Bulog untuk memastikan ketersediaan stok barang.	Lokasi-lokasi strategis dipilih, biasanya di wilayah dengan tingkat inflasi tinggi, daerah padat penduduk, atau daerah dengan daya beli rendah.	Barang seperti beras, minyak goreng, dan terigu disediakan dalam jumlah besar di lokasi operasi pasar.	Operasi pasar diawasi untuk mencegah penyimpangan, seperti penimbunan atau pembelian oleh pihak yang tidak berhak.
Pemantauan harga dilakukan di pasar-pasar tradisional dan modern untuk mengidentifikasi fluktuasi harga dan penyebab inflasi.	Penetapan harga jual bahan pokok di bawah harga pasar dilakukan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat.	Lokasi operasi pasar sering dilaksanakan di pasar tradisional, balai desa, atau lokasi lain yang mudah dijangkau masyarakat.	Penjualan langsung dilakukan kepada masyarakat dengan harga subsidi atau harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.	Evaluasi dilakukan untuk mengukur dampak operasi pasar terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

## Kelemahan Operasi Pasar

1. Operasi pasar sering kali tidak tepat sasaran karena masyarakat menengah ke atas juga bisa mendapatkan barang subsidi, sehingga tidak fokus pada kelompok
2. Ketersediaan barang subsidi sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat, terutama jika permintaan meningkat tajam.
3. Lokasi operasi pasar terbatas sehingga tidak dapat menjangkau semua wilayah, khususnya daerah terpencil atau pinggiran kota.
4. Operasi pasar hanya memberikan solusi sementara, sedangkan penyebab inflasi struktural seperti biaya produksi dan distribusi tetap belum terselesaikan.
5. Risiko penyelewengan seperti penimbunan barang subsidi oleh pedagang atau pembelian dalam jumlah besar untuk dijual kembali dengan harga tinggi.
6. Jika terlalu sering dilakukan, operasi pasar dapat membuat masyarakat bergantung pada subsidi pemerintah dan mengurangi dorongan untuk mencari solusi ekonomi yang lebih berkelanjutan.

## Peraturan Berkaitan dengan Operasi Pasar

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan
- e. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perum Bulog
- f. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen
- h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor-Impor Minyak Goreng
- i. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
- j. Surat Edaran Pemerintah Daerah

# KERJASAMA DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Untuk penguatan pasokan pangan di Kota Yogyakarta, model kerja sama antar daerah dapat mengacu pada **Kerja Sama Antar Daerah (KAD)** sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** serta **Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain**.

**Model kerja sama ini melibatkan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan melalui perjanjian atau memorandum of understanding (MoU) yang saling menguntungkan.**

Berdasarkan dasar hukum di atas, Kota Yogyakarta dapat:

- 1. Membentuk kerja sama formal** dengan daerah produsen pangan di sekitar wilayah DIY untuk memastikan pasokan bahan pokok stabil.
- 2. Memfasilitasi distribusi** pangan dengan biaya terjangkau untuk menekan harga pasar.
- 3. Mengawasi pelaksanaan kerja sama** agar berjalan sesuai hukum dan memberi manfaat langsung pada pengendalian inflasi.

## Model Kerja Sama Antar Daerah yang Tepat

### a. Kerja Sama Produksi

**Penguatan Hubungan Produsen-Konsumen:** Kota Yogyakarta sebagai daerah konsumen dapat bekerja sama dengan daerah produsen seperti kabupaten yang menjadi sentra pertanian (contoh: Sleman, Kulon Progo, Bantul).

**Perjanjian Penjualan Langsung:** Daerah penghasil pangan memasok hasil produksi langsung ke Yogyakarta dengan harga yang sudah disepakati, mengurangi keterlibatan tengkulak untuk menjaga harga tetap stabil.

### b. Kerja Sama Distribusi

**Peningkatan Infrastruktur Logistik:** Yogyakarta dapat bekerja sama dengan daerah sekitar untuk membangun atau mengoptimalkan infrastruktur distribusi seperti gudang pendingin, fasilitas penyimpanan, dan jalur transportasi.

**Kerja Sama Pasar:** Memastikan pasokan pangan seperti beras, sayur-mayur, dan daging dapat langsung dijual di pasar tradisional Kota Yogyakarta melalui kemitraan pasar induk antar daerah.

### c. Kerja Sama Cadangan Pangan

**Pengelolaan Lumbung Pangan Bersama:** Kota Yogyakarta dapat membuat lumbung pangan bersama daerah tetangga untuk menjaga pasokan saat masa krisis atau panen gagal.

**Kolaborasi Bulog Daerah:** Menggunakan Bulog sebagai pihak pengelola cadangan pangan yang mendukung stabilisasi harga dan ketersediaan pangan.

### d. Kerja Sama Inovasi Teknologi Pertanian

**Pengelolaan Sampah Organik:** Kota Yogyakarta dapat memberikan teknologi pengelolaan sampah organik untuk daerah produsen, yang hasilnya dimanfaatkan sebagai pupuk di wilayah pertanian.

## Tahapan Implementasi Kerja Sama

- 1. Identifikasi Kebutuhan dan Potensi:** Tentukan kebutuhan pangan Kota Yogyakarta dan potensi pasokan dari daerah mitra.
- 2. Penyusunan Kesepakatan:** Buat MoU atau perjanjian kerja sama yang mencakup hak, kewajiban, dan mekanisme pelaksanaan.
- 3. Monitoring dan Evaluasi:** Lakukan pemantauan secara rutin untuk memastikan kerja sama berjalan efektif dan menghasilkan dampak positif bagi semua pihak.

### a. DKI Jakarta dan Jawa Barat (Kerja Sama Pasokan Pangan)

**Perjanjian:** DKI Jakarta bekerja sama dengan Jawa Barat untuk pasokan pangan seperti beras, telur, dan daging.

**Kelembagaan:** Kerja sama ini difasilitasi oleh PD Pasar Jaya (Jakarta) dan BUMD pangan di Jawa Barat.

**Manfaat:** Menjamin ketersediaan bahan pangan di ibu kota, stabilisasi harga, dan pengurangan ketergantungan pada pasar nasional.

### b. Surabaya dan Kabupaten Mojokerto (Kerja Sama Distribusi Pangan)

**Perjanjian:** Surabaya bekerja sama dengan Kabupaten Mojokerto untuk pasokan sayur-mayur dan buah-buahan.

**Pendekatan:** Langsung dari petani ke pasar induk Surabaya, menghilangkan rantai distribusi yang panjang. Hal ini mendukung kestabilan harga dan ketersediaan produk di pasar.

# PEKARANGAN PANGAN LESTARI

**Pekarangan Pangan Lestari (P2L)** di Kota Yogyakarta adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan secara berkelanjutan. Program ini melibatkan masyarakat secara aktif untuk memproduksi pangan, mengelola hasilnya, serta menjaga ekosistem lokal.



Kota Yogyakarta memiliki lahan yang terbatas karena merupakan kota padat penduduk. Namun, kebutuhan untuk mendukung ketahanan pangan tetap menjadi prioritas pemerintah.

P2L berawal dari gagasan untuk memanfaatkan lahan-lahan kecil seperti pekarangan, kebun warga, hingga lahan kosong di kawasan perkotaan agar lebih produktif.

Konsep P2L selaras dengan upaya nasional dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya lokal.

Berdirinya P2L di Yogyakarta juga dipengaruhi oleh kesadaran lingkungan dan pentingnya urban farming (pertanian perkotaan) dalam menghadapi perubahan iklim serta keterbatasan lahan.



Dimulai pada tahun 2015, P2L di Kota Yogyakarta diinisiasi oleh **Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta**.

Program ini menjadi bagian dari agenda besar nasional untuk membangun **Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)**, yang digerakkan oleh **Kementerian Pertanian RI**.

Fokus awalnya adalah mendorong warga untuk menanam bahan pangan seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat di pekarangan rumah masing-masing.



## TUJUAN P2L

Memanfaatkan lahan-lahan kecil di perkotaan untuk produksi pangan.

Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.

Mengurangi ketergantungan pada bahan pangan impor dan distribusi dari luar kota.





Mendorong pola hidup sehat dengan mengonsumsi hasil pangan segar.

Menjaga keberlanjutan lingkungan melalui praktik pertanian ramah lingkungan.



Program ini berkembang di berbagai kelurahan seperti **Umbulharjo, Kotagede, Kraton, Ngampilan, dan Pakualaman**, di mana masyarakat memiliki antusiasme tinggi terhadap urban farming.

# LANJUTAN P2L

KENDALA P2L		UPAYA MENGATASI KENDALA P2L
<b>Keterbatasan Lahan</b>		
Kota Yogyakarta adalah wilayah urban dengan lahan yang sangat terbatas. Hal ini menjadi kendala utama untuk pengembangan kawasan pangan secara signifikan.		<b>Inovasi Teknologi:</b> Mendorong penggunaan teknologi pertanian modern seperti hidroponik, aquaponik, tambulapot dan vertikultur untuk mengatasi keterbatasan lahan.
Banyak lahan kecil yang tidak terintegrasi sehingga sulit untuk mengembangkan kawasan pangan dalam skala besar.		<b>Sistem Integrated Urban Farming Pangan (Situmpang):</b> Situmpang adalah inovasi pertanian perkotaan terpadu yang mengintegrasikan berbagai komponen pertanian, seperti tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan, dalam satu sistem. Program ini dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan terbatas di perkotaan dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
<b>Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat</b>		
Tidak semua warga memahami pentingnya memanfaatkan pekarangan untuk ketahanan pangan. Beberapa masyarakat lebih memilih lahan kosong untuk fungsi lain yang dianggap lebih menguntungkan.		<b>Sosialisasi dan Edukasi:</b> Pemerintah gencar melakukan pelatihan kepada masyarakat, terutama kelompok wanita tani, untuk meningkatkan kesadaran pentingnya PKPL.
Perubahan pola pikir membutuhkan waktu karena kebiasaan masyarakat perkotaan lebih cenderung bergantung pada pasar untuk memenuhi kebutuhan pangan.		
<b>Dukungan Infrastruktur Terbatas</b>		
Fasilitas untuk mendukung urban farming seperti alat tanam, pupuk organik, atau akses air sering kali terbatas.		
Beberapa kawasan menghadapi kendala teknis, seperti saluran air yang buruk atau minimnya akses sinar matahari di pekarangan.		
<b>Kendala Anggaran</b>		
Pengembangan PKPL membutuhkan anggaran untuk pelatihan, penyediaan bibit, dan infrastruktur pendukung. Jika anggaran terbatas, keberlanjutan program ini dapat terganggu.		<b>Dukungan Kebijakan:</b> Memasukkan P2L dalam program prioritas pembangunan daerah sehingga mendapatkan alokasi anggaran yang memadai.
Pendanaan dari pemerintah daerah sering kali tidak mencukupi untuk ekspansi program ke seluruh wilayah.		
<b>Kurangnya Tenaga Ahli</b>		
Tidak semua wilayah memiliki pendamping yang cukup kompeten untuk membimbing masyarakat dalam mengelola kawasan pangan lestari.		
Pengetahuan tentang teknik pertanian modern seperti hidroponik atau aeroponik belum sepenuhnya merata.		<b>Kerja Sama dengan Komunitas:</b> Melibatkan komunitas lokal dan perguruan tinggi di Yogyakarta untuk mendukung penelitian dan pengembangan pertanian perkotaan.
<b>Tantangan Perubahan Iklim</b>		
Kondisi cuaca yang tidak menentu akibat perubahan iklim dapat memengaruhi keberhasilan tanaman di kawasan pangan lestari.		
Kekeringan atau curah hujan berlebih sering kali menjadi tantangan bagi pertanian perkotaan.		

# KIOS SEGORO AMARTO

Kios Segoro Amarto adalah program yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mendukung ketahanan pangan dan menstabilkan harga bahan pokok. Kios ini dirancang untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, sekaligus menjadi saluran distribusi bahan pangan strategis bagi masyarakat di Yogyakarta.

Program Kios Segoro Amarto lahir dari kebutuhan untuk menyediakan bahan pokok dengan harga yang stabil di tengah situasi ekonomi yang fluktuatif, terutama selama pandemi COVID-19 dan menjelang momen-momen seperti hari besar keagamaan.

Nama "**Segoro Amarto**" berasal dari filosofi khas Yogyakarta:

Segoro: Laut, melambangkan keberlimpahan.

Amarto: Nama filosofis yang berarti kemakmuran atau kesejahteraan.

Filosofi ini mencerminkan visi Yogyakarta untuk menjadi kota yang mampu menyediakan kebutuhan dasar warganya secara melimpah dan adil.

Kios ini diinisiasi oleh **Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta** bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk **Bulog, pelaku usaha lokal, dan UMKM.**

Peluncuran perdana Kios Segoro Amarto dilakukan pada tahun **2020** sebagai salah satu solusi pengendalian inflasi dan peningkatan akses masyarakat terhadap bahan pokok berkualitas.

## Tantangan yang Dihadapi

**Distribusi Barang:** Kadang terjadi kendala dalam pengiriman stok barang, terutama saat permintaan meningkat drastis.

**Keterbatasan Lokasi:** Jumlah kios belum mencakup seluruh wilayah Yogyakarta, sehingga akses masyarakat di beberapa daerah masih terbatas.

**Persaingan dengan Pedagang Pasar:** Ada kekhawatiran bahwa keberadaan kios ini dapat memengaruhi pendapatan pedagang kecil di pasar tradisional.

## PENGEMBANGAN KIOS SEGORO AMARTO KE DEPAN

Menambah cabang Warung Segoro Amarto di area dengan konsentrasi masyarakat berpenghasilan rendah atau kawasan yang minim akses ke pasar tradisional.

Menggunakan konsep warung keliling (mobile) dengan kendaraan yang membawa bahan kebutuhan pokok ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau.

**Membentuk kemitraan dengan pedagang pasar tradisional untuk menyuplai barang kebutuhan pokok dari warung.**

**Memberikan edukasi bahwa tujuan Warung Segoro Amarto adalah menstabilkan harga, bukan mengambil pelanggan pedagang lokal.**

**Menggendeng pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung operasional warung.**

**Menjual produk non-subsidi seperti kebutuhan rumah tangga atau makanan olahan dengan keuntungan untuk mendukung operasional.**

Memanfaatkan media lokal seperti radio, surat kabar, dan media sosial untuk memperkenalkan Warung Segoro Amarto kepada masyarakat luas.

Menggunakan pendekatan komunitas, seperti RT/RW atau kelompok ibu-ibu PKK, untuk menyebarkan informasi tentang program ini.

Membuat skema bisnis yang lebih mandiri dengan mengurangi ketergantungan pada subsidi, misalnya melalui diversifikasi produk atau layanan tambahan seperti penyewaan alat pertanian.

Mengadopsi teknologi untuk meminimalkan biaya operasional, seperti sistem manajemen stok digital dan pembayaran nontunai.

### Lokasi dan Aksesibilitas

Kios Segoro Amarto ditempatkan di berbagai lokasi strategis di Kota Yogyakarta, terutama di dekat pasar

Pemilihan lokasi bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat yang membutuhkan bahan pokok dengan

### Mekanisme Operasional

**Penyediaan Barang:** Barang kebutuhan pokok disuplai dari Bulog dan pelaku usaha lokal dengan sistem harga stabil yang diawasi oleh Dinas Perdagangan.

**Harga Terjangkau:** Harga barang di Kios Segoro Amarto diatur agar lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar, tetapi tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

**Pengawasan Ketat:** Pemerintah Kota Yogyakarta secara berkala memantau operasional kios untuk memastikan tidak ada praktik penimbunan atau penyimpangan.

### Fungsi Sosial-Ekonomi

**Pengendalian Inflasi:** Membantu menjaga stabilitas harga bahan pokok di Yogyakarta, terutama saat terjadi lonjakan harga di pasar tradisional.

**Dukungan UMKM dan Petani Lokal:** Kios ini juga menjual produk lokal dari UMKM dan hasil pertanian setempat, sehingga membantu meningkatkan perekonomian lokal.

**Solusi Ketahanan Pangan:** Kios ini menjadi bagian dari strategi ketahanan pangan Kota Yogyakarta, terutama dalam menghadapi situasi darurat seperti pandemi atau bencana.

Untuk mengembangkan **Kios Segoro Amarto** di seluruh pasar di Kota Yogyakarta dan memastikan profitabilitasnya sambil tetap mendukung pengendalian inflasi, Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mengadopsi strategi berikut:



### Penguatan Rantai Pasok melalui Inovasi Model Bisnis

**Kemitraan dengan Petani dan Produsen Lokal:** Mengembangkan model bisnis waralaba (franchise) untuk mempercepat pembukaan kios di berbagai pasar dengan melibatkan pelaku usaha lokal. Dan menambahkan Diversifikasi Produk yang sering dibutuhkan masyarakat, seperti bahan kebutuhan pokok, sayuran segar, buah, dan produk olahan lokal, untuk menarik lebih banyak

**Optimalisasi Logistik:** Mengembangkan sistem distribusi terpadu yang efisien untuk mengurangi biaya transportasi dan risiko keterlambatan pengiriman bahan pangan.

**Pengelolaan Stok:** Implementasi sistem manajemen stok berbasis teknologi untuk memastikan ketersediaan bahan pangan sesuai permintaan pasar, menghindari overstock atau kekosongan.



### Peningkatan Pemasaran dan Branding

**Kampanye "Segoro Amarto":** Lakukan promosi yang menekankan pentingnya mendukung produk lokal dan menjaga stabilitas harga untuk kepentingan bersama.

**Digital Marketing:** Buat aplikasi atau platform digital untuk mempromosikan dan menjual produk Kios Segoro Amarto secara online.

**Poin Loyalitas:** Bangun sistem poin atau insentif bagi pelanggan setia yang sering berbelanja di Kios Segoro Amarto.

### Kolaborasi dan Edukasi Publik

**Edukasi Konsumen:** Sosialisasikan kepada masyarakat bahwa berbelanja di Kios Segoro Amarto membantu menjaga stabilitas harga dan mendukung ekonomi lokal.

### Pemantauan dan Evaluasi

**KPI untuk Setiap Kios:** Tetapkan indikator kinerja (Key Performance Indicators) seperti volume penjualan, tingkat kunjungan pelanggan, dan tingkat profitabilitas untuk memantau efektivitas operasional setiap kios.

**Survey Kepuasan Pelanggan:** Lakukan survei secara berkala untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, lalu gunakan data ini untuk meningkatkan layanan.



### Dengan strategi ini, Kios Segoro Amarto dapat:

1. Meningkatkan skala operasional di seluruh pasar tanpa kehilangan daya saing.
2. Mendukung kestabilan harga pangan melalui pasokan lokal dan harga terjangkau.
3. Mengintegrasikan komunitas lokal untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung.
4. Meningkatkan pendapatan melalui diversifikasi produk dan efisiensi operasional.

# WARUNG MRANTASI

**Warung Mrantasi** adalah salah satu program sosial ekonomi yang digagas Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bahan pokok dengan harga terjangkau. Konsep warung ini bertujuan untuk membantu masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah.

Nama "Mrantasi" berasal dari Bahasa Jawa yang berarti "berkecukupan" atau "memenuhi kebutuhan", mencerminkan tujuan warung ini sebagai solusi bagi masyarakat untuk mengakses kebutuhan pokok secara cukup dan layak.

Program ini diinisiasi oleh **Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta** bekerja sama dengan **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**, UMKM lokal, dan kelompok masyarakat.

Peluncuran pertama Warung Mrantasi dilakukan pada sekitar tahun **2021** di tengah pandemi COVID-19, sebagai respon pemerintah untuk mengurangi dampak ekonomi dan sosial dari krisis tersebut.

Fokus awalnya adalah memberikan akses pangan murah kepada masyarakat rentan, seperti buruh, pedagang kecil, dan masyarakat miskin.

## Tujuan Utama

**Peningkatan Ketahanan Pangan:** Menjamin masyarakat mendapatkan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan lain dengan harga stabil.

**Pemberdayaan Ekonomi Lokal:** Memberikan peluang bagi UMKM dan produsen lokal untuk memasarkan produknya.

**Stabilisasi Harga Pasar:** Sebagai alat untuk mengontrol lonjakan harga, terutama pada masa-masa tertentu seperti menjelang hari besar atau saat bencana.

## Lokasi dan Aksesibilitas

Warung Mrantasi dibuka di beberapa titik strategis di Kota Yogyakarta, terutama di wilayah yang memiliki konsentrasi masyarakat berpenghasilan rendah.

Lokasi sering dipilih di dekat pasar tradisional atau kawasan perkampungan untuk memastikan aksesibilitas yang baik.

## Barang dan Harga

Produk utama yang dijual adalah bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan sayuran segar, sering kali dijual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan pasar umum.

Barang-barang diambil dari distributor resmi, Bulog, dan petani lokal, dengan subsidi pemerintah untuk menjaga harga tetap rendah.

## Sistem Pengelolaan

Dikelola oleh koperasi, BUMD, atau kelompok masyarakat lokal dengan pengawasan langsung dari Dinas Perdagangan.

Transaksi dilakukan secara langsung atau berbasis teknologi untuk mempermudah pengelolaan stok dan harga.

# LANJUTAN WARUNG MRANTASI

Kendala Operasi Warung Mrantasi	UPAYA MENGATASI KENDALA		
<b>1. Keterbatasan Stok</b>			
Tingginya permintaan dari masyarakat sering kali membuat stok barang cepat habis, terutama pada saat momen-momen tertentu seperti hari besar keagamaan.	Mengintegrasikan Warung Mrantasi dengan program pangan lokal, seperti <b>Pekarangan Pangan Lestari (P2L)</b> , untuk menyuplai kebutuhan pokok langsung dari petani lokal.		
Distribusi dari produsen atau distributor utama kadang mengalami keterlambatan.	Menambah variasi barang yang dijual, termasuk kebutuhan rumah tangga lain seperti deterjen, gas elpiji, atau produk lokal dari UMKM.		
<b>2. Keterbatasan Lokasi</b>			
Tidak semua wilayah di Kota Yogyakarta terjangkau oleh Warung Mrantasi, sehingga sebagian masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran merasa sulit mengaksesnya.	Mengembangkan <b>aplikasi mobile</b> atau platform online yang memungkinkan masyarakat memesan barang secara daring. Ini juga membantu memantau stok dan permintaan secara lebih efisien.		
Jumlah warung yang terbatas juga membuat jangkauan program ini kurang merata.			
<b>3. Kompetisi dengan Pasar Tradisional</b>			
Beberapa pedagang pasar tradisional merasa terancam dengan keberadaan Warung Mrantasi karena harga yang			
Potensi ketegangan antara pemerintah dan pedagang pasar tradisional menjadi salah satu tantangan			
<b>4. Kendala Logistik dan Distribusi</b>			
Sistem distribusi yang melibatkan banyak pihak sering kali tidak efisien, sehingga memengaruhi kelancaran pasokan barang ke warung.	Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja Warung Mrantasi, termasuk analisis data penjualan, kepuasan pelanggan, dan efektivitas distribusi barang.		
Ketergantungan pada distributor tunggal seperti Bulog dapat menjadi kendala jika terjadi gangguan di tingkat nasional.	Membentuk <b>tim pengawas lokal</b> di setiap wilayah untuk memastikan operasional berjalan sesuai tujuan.		
<b>5. Kurangnya Sosialisasi</b>			
Sebagian masyarakat kurang mengetahui keberadaan dan manfaat Warung Mrantasi, sehingga program ini belum maksimal menjangkau target populasi yang membutuhkan.	Menedukasi masyarakat tentang pentingnya membeli bahan pangan lokal dan menggunakan fasilitas seperti Warung Mrantasi untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal.		
<b>6. Keberlanjutan Anggaran</b>			
Program ini bergantung pada subsidi pemerintah. Jika anggaran daerah terbatas, operasional warung dapat terganggu, mengakibatkan ketidakpastian keberlanjutan program.			

# ANALISIS STRATEGI DAN PROGRAM PENGENDALIAN INFLASIA

- **Salah satu arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta tahun 2025-2045 pada periode I (2025-2029) adalah peningkatan pengendalian dan penanggulangan dampak inflasi daerah.** Arah kebijakan tersebut merupakan bagian dari pencapaian misi transformasi ekonomi yang merata dan berkeadilan di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, menjadi kebutuhan untuk melakukan perencanaan program dan sub program/kegiatan yang terkait dengan pengendalian inflasi di Kota Yogyakarta.
- Secara sistimatis perencanaan program tersebut **dituangkan dalam dokumen Peta Jalan Pengendalian Inflasi.**

---

Pada tingkat nasional, pemerintah pusat dan Pemda DIY mengambil strategi dalam pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui Strategi 4 K. Strategi tersebut adalah:

---

**Keterjangkauan dan Stabilitas Harga**

---

**Ketersediaan dan Stabilitas pasokan bahan pangan**

---

**Kelancaran Distribusi**

---

**Komunikasi yang efektif**

---



Strategi 4 K menjadi strategi generik pada semua daerah, termasuk diadopsi di Kota Yogyakarta.

**Berdasarkan hasil FGD yang telah dilakukan, ada kebutuhan yang juga prioritas untuk dijadikan strategi untuk Kota Yogyakarta berupa tambahan 1 K, yaitu Kelembagaan.**

## STRATEGI & TUJUAN PENGENDALIAN INFLASI

No	Strategi	Tujuan Strategis
1	Keterjangkauan Harga	Terwujudnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
2	Ketersediaan Pasokan	1) Terpenuhinya cadangan pangan pokok 2) Terwujudnya stabilitas ketersediaan barang penting
3	Kelancaran distribusi	Terwujudnya kelancaran distribusi bahan pokok dan barang penting
4	Komunikasi efektif	Meningkatnya efektivitas komunikasi publik yang berkaitan dengan inflasi
5	Kelembagaan yang adaptif	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengendalian inflasi

# Program & Sub Program /Kegiatan

<b>1. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>	
	a) Pemantauan secara rutin dan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) terhadap harga dan stok barang kebutuhan pokok pada pasar rakyat, pasar modern, dan pasar online
	b) Perluasan peran dan penambahan jumlah Kos Segoro Amarto sebagai referensi harga barang kebutuhan pokok
	c) Melaksanakan operasi pasar
	d) Melaksanakan pasar murah
<b>2. Pemenuhan ketersediaan stok bahan pangan pokok</b>	
	a) Pengadaan beras untuk cadangan pangan pemerintah
	b) Pengembangan Pangan Lestari melalui perluasan Kampung Pangan Lestari dan Kampung Sayur.
	c) Kerjasama antar daerah untuk penguatan ketersediaan stok bahan pangan
	d) Memperkuat peran BUMD untuk pemenuhan stok dan distribusi barang kebutuhan pokok

# Program & Sub Program /Kegiatan

<b>3. Stabilisasi ketersediaan barang penting</b>	
	a) Pemantauan ketersediaan dan pengawasan distribusi LPG bersubsidi
	b) Pengawasan BBM pada SPBU
<b>4. Mengefektifkan manajemen transportasi dan distribusi bahan pokok dan barang penting</b>	
	a) Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalur distribusi bahan pokok dan barang penting
	b) Pengawasan dan pengendalian implementasi kebijakan manajemen lalu lintas
<b>5. Mengefektifkan dan perluasan komunikasi publik yang berkaitan dengan inflasi.</b>	
	a) Sosialisasi program pengendalian harga
	b) Perluasan informasi harga real time melalui media daring (online) dan luring (offline).

# Program & Sub Program /Kegiatan

## 6. Memperkuat sinergitas antar pemangku kepentingan terkait pengendalian inflasi

- a) Mengefektifkan perencanaan program lintas OPD melalui desk tematik
- b) Koordinasi pelaksanaan dan evaluasi program dengan pemda DIY dan pemerintah pusat
- c) Koordinasi pelaksanaan dan evaluasi program lintas OPD
- d) Koordinasi pelaksanaan dan evaluasi program dengan asosiasi dan lembaga terkait lainnya
- e) Penjaringan inovasi untuk pengendalian inflasi dan penanggulangan dampak inflasi bekerjasama dengan perguruan tinggi dan pusat inovasi lainnya
- f) Meningkatkan kapasitas sumberdaya TPID dan pihak lain yang terkait pengendalian inflasi

# PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI



## Tabel Peta Jalan Pengendalian Inflasi Kota Yogyakarta, Tahun 2025- 2027

Strategi & Tujuan	Program	Sub program/ Kegiatan Tahun 2025	Sub program/ Kegiatan Tahun 2026	Sub program/ Kegiatan Tahun 2027	OPD utama & OPD pendukung/Mitra Strategis
<b>Strategi:</b> Keterjangkauan Harga  <b>Tujuan:</b> Terwujudnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Pemantauan secara rutin dan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) terhadap harga dan stok barang kebutuhan pokok pada pasar rakyat, pasar modern, dan pasar online  Target & Sasaran: 1) 10 pasar rakyat 2) 3 pasar modern 3) 2 pasar online	Pemantauan secara rutin dan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) terhadap harga dan stok barang kebutuhan pokok pada pasar rakyat, pasar modern, dan pasar online  Target & Sasaran: 1) 10 pasar rakyat 2) 3 pasar modern 3) 2 pasar online	Pemantauan secara rutin dan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) terhadap harga dan stok barang kebutuhan pokok pada pasar rakyat, pasar modern, dan pasar online  Target & Sasaran: 1) 10 pasar rakyat 2) 3 pasar modern 3) 2 pasar online	Dinas Perdagangan  Mitra: TPID
		Perluasan peran dan penambahan jumlah Kios Segoro Amarto sebagai referensi harga barang kebutuhan pokok  Target & Sasaran: 5 Kios Segoro Amarto	Perluasan peran dan penambahan jumlah Kios Segoro Amarto sebagai referensi harga barang kebutuhan pokok  Target & Sasaran: 8 Kios Segoro Amarto	Perluasan peran dan penambahan jumlah Kios Segoro Amarto sebagai referensi harga barang kebutuhan pokok  Target & Sasaran: 10 Kios Segoro Amarto	Dinas Perdagangan  Mitra: Bulog DIY

Strategi & Tujuan	Program	Sub program/ Kegiatan Tahun 2025	Sub program/ Kegiatan Tahun 2026	Sub program/ Kegiatan Tahun 2027	OPD utama & OPD pendukung/Mitra Strategis
		<p>Melaksanakan operasi pasar</p> <p>Target &amp; Sasaran:</p> <p>Sepanjang tahun sesuai kondisi masyarakat dan kebijakan pemerintah pusat pada titik distribusi utama untuk komoditas beras, minyak goreng, gula, dan komoditas lainnya</p>	<p>Melaksanakan operasi pasar</p> <p>Target &amp; Sasaran:</p> <p>Sepanjang tahun sesuai kondisi masyarakat dan kebijakan pemerintah pusat pada titik distribusi utama untuk komoditas beras, minyak goreng, gula, dan komoditas lainnya</p>	<p>Melaksanakan operasi pasar</p> <p>Target &amp; Sasaran:</p> <p>Sepanjang tahun sesuai kondisi masyarakat dan kebijakan pemerintah pusat pada titik distribusi utama untuk komoditas beras, minyak goreng, gula, dan komoditas lainnya</p>	<p>Dinas Perdagangan</p> <p>Mitra: Bulog DIY</p>
		<p>Melaksanakan pasar murah</p> <p>Target &amp; Sasaran:</p> <p>Saat HBKN dan kondisi kebutuhan (<i>just in time</i>) pengendalian harga pada kelurahan yang banyak keluarga miskin</p>	<p>Melaksanakan pasar murah</p> <p>Target &amp; Sasaran:</p> <p>Saat HBKN dan kondisi kebutuhan (<i>just in time</i>) pengendalian harga pada kelurahan yang banyak keluarga miskin</p>	<p>Melaksanakan pasar murah</p> <p>Target &amp; Sasaran:</p> <p>Saat HBKN dan kondisi kebutuhan (<i>just in time</i>) pengendalian harga pada kelurahan yang banyak keluarga miskin</p>	<p>Dinas Perdagangan</p> <p>Mitra: Kementrian RI, Dinas Perdagangan DIY, Bulog DIY</p>

Strategi & Tujuan	Program	Sub program/ Kegiatan Tahun 2025	Sub program/ Kegiatan Tahun 2026	Sub program/ Kegiatan Tahun 2027	OPD utama & OPD pendukung/ Mitra Strategis
<p><b>Strategi:</b> Ketersediaan Pasokan</p> <p><b>Tujuan 1:</b> Terpenuhinya cadangan pangan pokok</p>	<p>Pemenuhan ketersediaan stok bahan pangan pokok</p>	<p>Pengadaan beras untuk cadangan pangan pemerintah</p> <p>Target &amp; Sasaran:</p> <p>Terpenuhi cadangan beras pemerintah 100 ton</p>	<p>Pengadaan beras untuk cadangan pangan pemerintah</p> <p>Target &amp; Sasaran:</p> <p>Terpenuhi cadangan beras pemerintah 120 ton</p>	<p>Pengadaan beras untuk cadangan pangan pemerintah</p> <p>Target &amp; Sasaran:</p> <p>Terpenuhi cadangan beras pemerintah 120 ton</p>	<p>Dinas Pertanian dan Pangan</p> <p>Mitra: Bulog PT Tarumartani</p>
		<p>Pengembangan Pangan Lestari melalui perluasan Kampung Pangan Lestari dan Kampung Sayur.</p> <p>Target &amp; Sasaran:</p> <p>Pengembangan 130 Kampung Sayur &amp; Lorong Sayur, dan 30 Kampung Pangan Lestari</p>	<p>Pengembangan Pangan Lestari melalui perluasan Kampung Pangan Lestari dan Kampung Sayur.</p> <p>Target &amp; Sasaran:</p> <p>Pengembangan 140 Kampung Sayur &amp; Lorong Sayur, dan 35 Kampung Pangan Lestari</p>	<p>Pengembangan Pangan Lestari melalui perluasan Kampung Pangan Lestari dan Kampung Sayur.</p> <p>Target &amp; Sasaran:</p> <p>Pengembangan 150 Kampung Sayur &amp; Lorong Sayur, dan 40 Kampung Pangan Lestari</p>	<p>Dinas Pertanian dan Pangan</p> <p>Mitra: BUMS/BUMD/BUMN melalui program CSR</p>
		<p>Kerjasama antar daerah untuk penguatan ketersediaan stok bahan pangan</p>	<p>Kerjasama antar daerah untuk penguatan ketersediaan stok bahan pangan</p>	<p>Kerjasama antar daerah untuk penguatan ketersediaan stok bahan pangan</p>	<p>Bidang Perekonomian</p>

Strategi & Tujuan	Program	Sub program/ Kegiatan Tahun 2025	Sub program/ Kegiatan Tahun 2026	Sub program/ Kegiatan Tahun 2027	OPD utama & OPD pendukung/Mitra Strategis
		<p>Target &amp; Sasaran:</p> <p>Kerjasama dengan kabupaten produsen bahan pangan di DIY (3 kabupaten) dan Luar DIY (4 kabupaten)</p>	<p>Target &amp; Sasaran:</p> <p>Kerjasama dengan kabupaten produsen bahan pangan di DIY (3 kabupaten) dan Luar DIY (4 kabupaten)</p>	<p>Target &amp; Sasaran:</p> <p>Kerjasama dengan kabupaten produsen bahan pangan di DIY (3 kabupaten) dan Luar DIY (4 kabupaten)</p>	
		<p>Memperkuat peran BUMD untuk pemenuhan stok dan distribusi barang kebutuhan pokok</p> <p>Target &amp; Sasaran: Penugasan 1 BUMD untuk pemenuhan stok dan distribusi barang kebutuhan pokok</p>	<p>Memperkuat peran BUMD untuk pemenuhan stok dan distribusi barang kebutuhan pokok</p> <p>Target &amp; Sasaran: Penugasan 1 BUMD untuk pemenuhan stok dan distribusi barang kebutuhan pokok</p>	<p>Memperkuat peran BUMD untuk pemenuhan stok dan distribusi barang kebutuhan pokok</p> <p>Target &amp; Sasaran: Penugasan 1 BUMD untuk pemenuhan stok dan distribusi barang kebutuhan pokok</p>	<p>Bidang Perekonomian</p> <p>Mitra: BUMD</p>
<p><b>Strategi:</b> Ketersediaan Pasokan</p> <p><b>Tujuan 2:</b> Terwujudnya</p>	<p>Stabilisasi ketersediaan barang penting</p>	<p>Pemantauan ketersediaan dan pengawasan distribusi LPG bersubsidi</p> <p>Target &amp; Sasaran:</p>	<p>Pemantauan ketersediaan dan pengawasan distribusi LPG bersubsidi</p> <p>Target &amp; Sasaran:</p>	<p>Pemantauan ketersediaan dan pengawasan distribusi LPG bersubsidi</p> <p>Target &amp; Sasaran:</p>	<p>Dinas Perdagangan</p> <p>Mitra: Hiswana migas Pertamina</p>

Strategi & Tujuan	Program	Sub program/ Kegiatan Tahun 2025	Sub program/ Kegiatan Tahun 2026	Sub program/ Kegiatan Tahun 2027	OPD utama & OPD pendukung/ Mitra Strategis
<p>stabilitas ketersediaan barang penting</p>		<p>14 agen dan 46 pangkalan LPG bersubsidi</p>	<p>14 agen dan 46 pangkalan LPG bersubsidi</p>	<p>14 agen dan 46 pangkalan LPG bersubsidi</p>	
		<p>Pengawasan BBM pada SPBU</p> <p>Target &amp; Sasaran: 10 SPBU</p>	<p>Pengawasan BBM pada SPBU</p> <p>Target &amp; Sasaran: 10 SPBU</p>	<p>Pengawasan BBM pada SPBU</p> <p>Target &amp; Sasaran: 10 SPBU</p>	<p>Dinas Perdagangan</p> <p>Mitra: Hiswana migas, Pertamina</p>
<p><b>Strategi:</b> Kelancaran distribusi</p> <p><b>Tujuan:</b> Terwujudnya kelancaran distribusi bahan pokok dan barang penting</p>	<p>Mengefektifkan manajemen transportasi dan distribusi bahan pokok dan barang penting</p>	<p>Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalur distribusi bahan pokok dan barang penting</p> <p>Target &amp; Sasaran:</p> <p>Review Perencanaan Angkutan Barang terkait akan beroperasinya Toll di DIY</p>	<p>Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalur distribusi bahan pokok dan barang penting</p> <p>Target &amp; Sasaran:</p> <p>update Rencana Angkutan Barang sesuai perkembangan kota</p>	<p>Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalur distribusi bahan pokok dan barang penting</p> <p>Target &amp; Sasaran:</p> <p>update Rencana Angkutan Barang sesuai perkembangan kota</p>	<p>Dinas Perhubungan</p>
		<p>Pengawasan dan pengendalian implementasi kebijakan manajemen lalu lintas</p>	<p>Pengawasan dan pengendalian lalu lintas lintas daerah</p> <p>Target &amp; Sasaran:</p>	<p>Pengawasan dan pengendalian lalu lintas lintas daerah</p> <p>Target &amp; Sasaran:</p>	<p>Dinas Perhubungan</p>

Strategi & Tujuan	Program	Sub program/ Kegiatan Tahun 2025	Sub program/ Kegiatan Tahun 2026	Sub program/ Kegiatan Tahun 2027	OPD utama & OPD pendukung/ Mitra Strategis
		Target & Sasaran: Implementasi manajemen lalu lintas sesuai update Rencana Angkutan Barang	Implementasi manajemen lalu lintas sesuai update Rencana Angkutan Barang	Implementasi manajemen lalu lintas sesuai update Rencana Angkutan Barang	
<b>Strategi:</b> Komunikasi efektif  <b>Tujuan:</b> Meningkatnya efektivitas komunikasi publik yang berkaitan dengan inflasi	Mengefektifkan dan perluasan komunikasi publik yang berkaitan dengan inflasi.	Sosialisasi program pengendalian harga  Target & Sasaran:  Jumpa pers & release media secara berkala minimal 2 bulan sekali dan/atau saat HKBN	Sosialisasi program pengendalian harga  Target & Sasaran:  Jumpa pers & release media secara berkala minimal 2 bulan sekali dan/atau saat HKBN	Sosialisasi program pengendalian harga  Target & Sasaran:  Jumpa pers & release media secara berkala minimal 2 bulan sekali dan/atau saat HKBN	Dinas Kominfo  Mitra: Media masa
		Perluasan informasi harga <i>real time</i> melalui media daring ( <i>online</i> ) dan luring ( <i>offline</i> ).  Target & Sasaran:  Tersedianya informasi harga pada informasi digital pada 5 pasar rakyat dan aplikasi JSS secara <i>real time</i>	Perluasan informasi harga <i>real time</i> melalui media daring ( <i>online</i> ) dan luring ( <i>offline</i> ).  Target & Sasaran:  Tersedianya informasi harga pada informasi digital pada 10 pasar rakyat dan aplikasi JSS secara <i>real time</i>	Perluasan informasi harga <i>real time</i> melalui media daring ( <i>online</i> ) dan luring ( <i>offline</i> ).  Target & Sasaran:  Tersedianya informasi harga pada informasi digital pada 10 pasar rakyat dan aplikasi JSS secara <i>real time</i>	Dinas Kominfo

Strategi & Tujuan	Program	Sub program/ Kegiatan Tahun 2025	Sub program/ Kegiatan Tahun 2026	Sub program/ Kegiatan Tahun 2027	OPD utama & OPD pendukung/ Mitra Strategis
<p><b>Strategi:</b> Kelembagaan yang adaptif</p> <p><b>Tujuan:</b> Meningkatnya kapasitas kelembagaan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengendalian inflasi</p>	<p>Memperkuat sinergitas antar pemangku kepentingan terkait pengendalian inflasi</p>	<p>Mengefektifkan perencanaan program lintas OPD melalui desk tematik</p> <p>Target &amp; Sasaran:</p> <p>Tersusun APBD 2026 dan perubahan APBD 2025 yang ada <i>tagging</i> belanja untuk pengendalian inflasi</p>	<p>Mengefektifkan perencanaan program lintas OPD melalui desk tematik</p> <p>Target &amp; Sasaran:</p> <p>Tersusun APBD 2027 dan perubahan APBD 2026 yang ada <i>tagging</i> belanja untuk pengendalian inflasi</p>	<p>Mengefektifkan perencanaan program lintas OPD melalui desk tematik</p> <p>Target &amp; Sasaran:</p> <p>Tersusun APBD 2028 dan perubahan APBD 2027 yang ada <i>tagging</i> belanja untuk pengendalian inflasi</p>	<p>Bappeda</p> <p>Mitra: Semua OPD terkait</p>
		<p>Koordinasi pelaksanaan dan evaluasi program dengan pemda DIY dan pemerintah pusat</p> <p>Target &amp; Sasaran: Rakor pengendalian inflasi dengan Pemda DIY dan pemerintah pusat dan Lembaga terkait (Bank Indonesia, dan Lembaga lainnya) secara rutin dan/atau</p>	<p>Koordinasi pelaksanaan dan evaluasi program dengan pemda DIY dan pemerintah pusat</p> <p>Target &amp; Sasaran: Rakor pengendalian inflasi dengan Pemda DIY dan pemerintah pusat dan Lembaga terkait (Bank Indonesia, dan Lembaga lainnya)</p>	<p>Koordinasi pelaksanaan dan evaluasi program dengan pemda DIY dan pemerintah pusat</p> <p>Target &amp; Sasaran: Rakor pengendalian inflasi dengan Pemda DIY dan pemerintah pusat dan Lembaga terkait (Bank Indonesia, dan Lembaga lainnya)</p>	<p>Bidang Perekonomian</p> <p>Mitra: Pemda DIY Pemerintah Pusat Bank Indonesia</p>

Strategi & Tujuan	Program	Sub program/ Kegiatan Tahun 2025	Sub program/ Kegiatan Tahun 2026	Sub program/ Kegiatan Tahun 2027	OPD utama & OPD pendukung/Mitra Strategis
		sesuai perkembangan kondisi perekonomian	secara rutin dan/atau sesuai perkembangan kondisi perekonomian	secara rutin dan/atau sesuai perkembangan kondisi perekonomian	
		Koordinasi pelaksanaan dan evaluasi program lintas OPD  Target & Sasaran:  Rapat kerja dan evaluasi pengendalian inflasi dengan semua OPD terkait secara rutin 3 bulan sekali dan/atau sesuai perkembangan kondisi perekonomian	Koordinasi pelaksanaan dan evaluasi program lintas OPD  Target & Sasaran:  Rapat kerja dan evaluasi pengendalian inflasi dengan semua OPD terkait secara rutin 3 bulan sekali dan/atau sesuai perkembangan kondisi perekonomian	Koordinasi pelaksanaan dan evaluasi program lintas OPD  Target & Sasaran:  Rapat kerja dan evaluasi pengendalian inflasi dengan semua OPD terkait secara rutin 3 bulan sekali dan/atau sesuai perkembangan kondisi perekonomian	Bidang Perekonomian  Mitra: Semua OPD terkait
		Koordinasi pelaksanaan dan evaluasi program dengan asosiasi dan lembaga terkait lainnya  Tugas & Sasaran: Rapat kerja dan evaluasi pengendalian inflasi dengan asosiasi	Koordinasi pelaksanaan dan evaluasi program dengan asosiasi dan lembaga terkait lainnya  Tugas & Sasaran: Rapat kerja dan evaluasi pengendalian	Koordinasi pelaksanaan dan evaluasi program dengan asosiasi dan lembaga terkait lainnya  Tugas & Sasaran: Rapat kerja dan evaluasi pengendalian	Bidang Perekonomian  Mitra: Asosiasi pedagang pasar rakyat Asosiasi perdagangan Perguruan tinggi BPS

Strategi & Tujuan	Program	Sub program/ Kegiatan Tahun 2025	Sub program/ Kegiatan Tahun 2026	Sub program/ Kegiatan Tahun 2027	OPD utama & OPD pendukung/ Mitra Strategis
		perdagangan dan usaha minimal 1 sekali dan/atau sesuai perkembangan kondisi perekonomian	inflasi dengan asosiasi perdagangan dan usaha minimal 1 sekali dan/atau sesuai perkembangan kondisi perekonomian	inflasi dengan asosiasi perdagangan dan usaha minimal 1 sekali dan/atau sesuai perkembangan kondisi perekonomian	
		<p>Peniarangan inovasi untuk pengendalian inflasi dan penanggulangan dampak inflasi bekerjasama dengan perguruan tinggi dan pusat inovasi lainnya.</p> <p>Target &amp; Sasaran: Ada 1 inovasi program &amp; kegiatan terkait pengendalian inflasi</p>	<p>Peniarangan inovasi untuk pengendalian inflasi dan penanggulangan dampak inflasi bekerjasama dengan perguruan tinggi dan pusat inovasi lainnya.</p> <p>Target &amp; Sasaran: Ada 1 inovasi program &amp; kegiatan terkait pengendalian inflasi</p>	<p>Peniarangan inovasi untuk pengendalian inflasi dan penanggulangan dampak inflasi bekerjasama dengan perguruan tinggi dan pusat inovasi lainnya.</p> <p>Target &amp; Sasaran: Ada 1 inovasi program &amp; kegiatan terkait pengendalian inflasi</p>	<p>Bidang Perekonomian</p> <p>Mitra: Perguruan tinggi BRIN</p>
		<p>Meningkatkan kapasitas sumberdaya TPID dan pihak lain yang terkait pengendalian inflasi</p> <p>Target &amp; Sasaran:</p>	<p>Meningkatkan kapasitas sumberdaya TPID pihak lain yang terkait pengendalian inflasi</p> <p>Target &amp; Sasaran:</p>	<p>Meningkatkan kapasitas sumberdaya TPID pihak lain yang terkait pengendalian inflasi</p> <p>Target &amp; Sasaran:</p>	<p>Bidang Perekonomian</p>

Strategi & Tujuan	Program	Sub program/ Kegiatan Tahun 2025	Sub program/ Kegiatan Tahun 2026	Sub program/ Kegiatan Tahun 2027	OPD utama & OPD pendukung/ Mitra Strategis
		Bimbingan teknis 1 tematik untuk SDM TPID ataupun pihak terkait pengendalian inflasi	Bimbingan teknis 1 tematik untuk SDM TPID ataupun pihak terkait pengendalian inflasi	Bimbingan teknis 1 tematik untuk SDM TPID ataupun pihak terkait pengendalian inflasi	

# DOKUMENTASI





**DOKUMENTASI**

# DOKUMENTASI





# DOKUMENTASI



# **MATURNUWUN & MOHON SARAN**

---

